



RENCANA STRATEGIS *Periode 2019-2023*



RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2019-2023



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jalan Pengeran Muhamad KM. 05 Simpeureum-Cigasong Majalengka
email : Diskominfo@majalengkakab.go.id. Website : [Diskominfo majalengkakab.go.id](http://Diskominfo.majalengkakab.go.id).



KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karuniaNya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dapat merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik Sektoral telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik Sektoral yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka untuk kurun waktu tahun 2019-2023, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Tantangan dan permasalahan pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika masyarakat, , kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat



Melalui Kesempatan ini, saya mengajak kepada semua unsure Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan Informasi dan Komunikasi Publik guna mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Majalengka “**RAHARJA**”

Semoga upaya kita mendapat Rahmat dan Hidayah-Nya. Amin.

Majalengka , Agustus 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka



Drs. MAMAN SUTIMAN

Pembina UtamaMuda

NIP. 19620923 198210 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jalan Pengeran Muhamad KM. 05 Simpeureum-Cigasong Majalengka
email : Diskominfo@majalengkakab.go.id. Website : [Diskominfo majalengkakab.go.id](http://Diskominfo.majalengkakab.go.id).

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 TAHUN PELAKSANAAN 2019 - 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. Bahwa kelembagaan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
- b. Bahwa kelembagaan OPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di susun Rencana Strategis (RENSTRA) OPD sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan :
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika periode Pelaksanaan tahun 2019-2023:

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana ;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);

18. Peraturan Menteri.....

19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 Nomor 6 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 nomo 2);
25. Peraturan daerah Kabupaten majalengka Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Majalengka tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2014 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2019 -2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, agar menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan tahun anggaran 2019-2023:

Ditetapkan di : Majalengka

Pada Tanggal : April 2019

Ⓢ Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



Ⓢ MAMAN SUTIMAN

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar.....	iii
Daftar Table.....	iv
BAB. I. PENDAHULUAN.....	1.1
1.1 Latar Belakang.....	1.1
1.2 Dasar Hukum.....	1.5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	1.10
1.4. Sistematika Penulisan.....	1.11
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN OPD	2.1
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD	2.1
2.2 Sumber Daya OPD.....	2.3
2.3 Kinerja Pelayanan OPD.....	2.5
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	2.5
BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU TRATEGIS PERANGKAT DAERAH	3.1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan OPD	3.1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	3.5
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD.....	3.8
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	3.10
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	3.14
BAB.IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD...	4.1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	4.1
BAB.V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	5.1
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	5.1
BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF.....	6.1
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif.....	6.1



BAB. VII. KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN.....	7.1
7.1 Kinerja Pelayanan Bidang Urusan.....	7.1
BAB. VIII. PENUTUP.....	8.1
8.1 Penutup	8.1



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	2.3.



DAFTAR TABEL

			Halaman
1	2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika (TC.23)	2.5
2	6.1	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif (TC.27)	6.1
3	7.1	Kinerja Pelayanan Bidang Urusan (TC. 28)	7.1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka tahun pelaksanaan 2019 – 2023, merupakan bentuk pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Komunikasi, Informatika Statistik Sektoral dan Persandian yang menyelenggarakan kewenangan daerah urusan Pemerintahan Wajib Tidak terkait Pelayanan Dasar

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berfungsi sebagai alat kendali dan pedoman Perencanaan untuk periode 5 (Lima) tahun kedepan sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka sesuai dengan Tugas Pokok dan



Fungsi. disusun sesuai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Barat, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan dengan mempertimbangkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta trend komunikasi dan partisipasi publik yang dipengaruhi oleh perkembangan TIK tersebut.

E- Government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik kearah digital secara efisien dan efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayanan masyarakat.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat mudah dan akurat. oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung Infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua Perangkat Daerah dengan sistem yang terintegrasi, Peningkatan pengelolaan Komunikasi dan Informatika untuk peningkatan penggamanaan Informasi Pemerintah daerah dan tersedianya Data Statistik Sektoral dan Persandian dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan Renstra melibatkan proses konsultatif atas-bawah (top down) dan bawah atas (bottom up).



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi Informatika Statistik Sektoral dan Persandian, maka disusunlah : Rancangan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan tahun 2019 s/d 2023, Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu kepada RPJPD, RPJMD dan Renstra Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan, sebagai berikut :

A. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan-kegiatan dalam tahap penyusunan rancangan Renstra PD dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Menelaahan RTRW Pemerintah Kabupaten Majalengka
2. Penelaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah terkait dengan Urusan Pemerintahan Wajib tidak terkait Pelayanan Dasar
3. Pengumpulan data dan informasi Dinas Komunikasi, Informatika Statistik Sektoral dan Persandian.
4. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka
5. Menganalisis gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka
6. Perumusan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Majalengka
7. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas kominfo Kabupaten Majalengka
8. Perumusan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka
9. Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana prioritas RPJMD;
10. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah Dinas Kominfo Kabupaten Majalengka yang mengacu pada tujuan dan sasaran Revisi RPJMD.



B. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir

Penyusunan rancangan akhir Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Perangkat Daerah bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah ini dilakukan melalui dua tahap yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

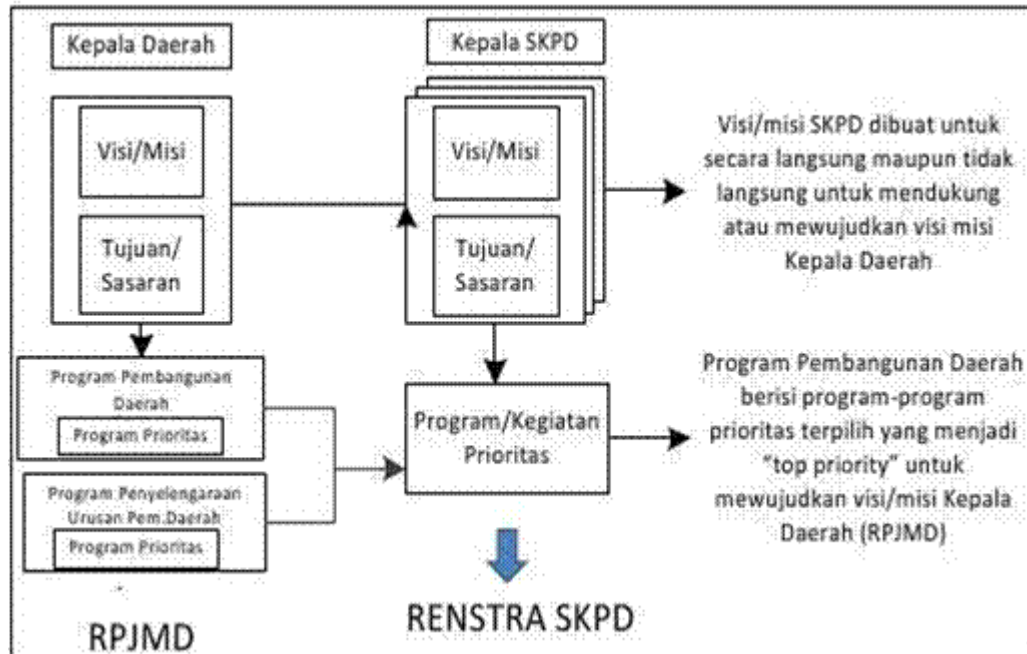
1. Tahap perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah
2. Tahap penyajian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah .

C. Tahap Penetapan

Setelah rancangan akhir selesai, selanjutnya disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappelitbangda untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah. Dalam hal ini, pengesahan renstra Perangkat Daerah dengan keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, maka Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman unit kerja dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah. Pengesahan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dengan keputusan Kepala Daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Sedangkan penetapan Renstra Perangkat Daerah oleh kepala Perangkat Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra Perangkat Daerah disahkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan hal-hal diatas, mandat dan tanggung jawab Bupati dijabarkan dalam RPJMD, sedangkan mandat dan tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah

Gambar 1.1
Hubungan antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Formil

Landasan penyusunan Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023 antara lain:

Landasan Idiil : Pancasila

Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

Landasan Operasional

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968



- Nomor : 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RO Nomor 4252);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaran Penyiaran Swasta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4567);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 16. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
27. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);



30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
31. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.



40. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 Tentang tatacara Perencanaan ,Pengendalian & evaluasi Pembangunan Daerah ;

Landasan Materil

Masukan, saran, pendapat, dan aspirasi seluruh pejabat Struktural sebagai hasil perumusan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan melalui rapat koordinasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan tolak ukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Majalengka dalam pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung tercapainya Visi, Misi, dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019-2023.

Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka sebagai berikut:

1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Majalengka;
2. Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dalam rentang tahun 2019-2023;
3. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistimatika Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka tahun 2019-2023 berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat :

- 1.1. Latar Belakang penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran RPJMD dan Renstra Nasional yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka ;
- 1.2. Landasan Hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra;
- 1.3. Maksud dan tujuan penyusunan Renstra;
- 1.4. Sistematika Penulisan penyusunan Renstra;

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD priode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatas melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini.

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah;



BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, telaahan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Sektoral dan Persandian yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kominfo ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Dinas Kominfo Statistik Sektoral dan Persandian
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Kominfo Statistik dan Persandian
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Kominfo Statistik Sektoral dan Persandian

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel.T.C25



BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (Lima) tahun mendatang yaitu pada tabel T.C.26.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T.C.27

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Revisi RPJMD Kabupaten Majalengka 2019-2023; Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel.T.C.28

BAB VIII. PENUTUP



BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD

Berdasarkan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka yang dijabarkan dengan peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, tugas pokok Dinas adalah : ***Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika dan bidang Statistik sektoral dan Persandian*** yang mempunyai tugas, fungsi, kewenangan sebagai berikut :

1. Tugas

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka yang di bentuk berdasarkan Perda 14 Tahun 2016 adalah merumuskan, menyelenggarakan kegiatan, membina, mengevaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan azas Desentralisasi dan tugas pembantuan pada urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik Sektoral dan Persandian.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Urusan Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian



2. Penyelenggaraan Kegiatan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan umum urusan Komunikasi, Informatika Statistik sektoral dan Persandian
3. Penyelenggaraan Pembinaan dan bimbingan teknis urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Persandian
4. Evaluasi dan Pelaporan urusan umum Komunikasi, Informatika dan Statistik Sektoral dan Persandian
5. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika ;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Kewenangan

Dalam menjalankan tugas Pokok dan Fungsi di bidang Kebijakan Teknis Komunikasi, Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian Kabupaten Majalengka adalah :

1. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang Komunikasi, Informatika Statistik Sektoral dan Persandian
2. Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan asli Daerah berupa retribusi jasa umum pengendalian Menara Telekomunikasi
3. Mengatur, mengendalikan, pengawasan di bidang komunikasi, Informatika dan Statistik Sektoral dan Persandian
4. Melaksanakan koordinasi antar lembaga teknis pusat maupun daerah.

4. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Perda nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka, terdiri atas seorang Kepala Dinas (eselon II) sekretaris Dinas (eselon III) 3 Orang Kepala Bidang (eselon III) 2 orang Kasubag , dan 6 Orang Kepala Seksi (eselon IV) dengan Struktur Sebagai berikut:



1. Kepala Dinas
 2. Sekertaris, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 3. Bidang Komunikasi membawahkan :
 - a) Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Informasi Publik
 - b) Seksi Pengelolaan dan Diseminasi Informasi
 4. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Informatika Membawahkan :
 - a) Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi
 - b) Seksi Tata Kelola E- Government dan Pengembangan Aplikasi
 - c) Seksi Kemitraan Media dan Komunikasi
 5. Bidang Statistik Sektoral dan Persandian membawahkan:
 - a) Seksi Kompilasi Data
 - b) Seksi Pengolahan dan Analisis Data
 - c) Seksi Persandian
- (Struktur Organisasi sebagaimana Daftar terlampir)

2.2. SUMBER DAYA OPD

1. Keadaan Sumberdaya Manusia

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk pencapaian sasaran dan tujuan, serta indikator kinerja dibantu oleh Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi dan ditunjang pula oleh unsur Fungsional Umum dan Khusus. Berikut ini data kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019. *lihat pada table di bawah ini berdasarkan jenjang Pendidikan*



No	Pendidikan	Jumlah	
1	2	3	
1	SLTP	2	Orang
2	SLTA	5	Orang
3	D2	1	Orang
4	S1	17	Orang
5	S2	6	Orang
6	THL	17	Orang
Jumlah		45	Orang

2. Sarana dan Fasilitas Pendukung

Sarana pendukung dan penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selain ditunjang oleh sumber dana, sumber daya manusia, juga dilengkapi sarana dan fasilitas yang mendukung bagi pelaksanaan program dan Kegiatan. Berikut ini adalah data kondisi sarana dan fasilitas pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka pada awal tahun 2018

Sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan
1	2	3	4
1	Computer	12	Baik
2	Printer	10	Baik
3	Meja Kerja	21	Baik
4	Kursi Kerja	21	Baik
5	Lemari Arsip	8	Baik
6	Server	2	Baik
7	Kursi Tamu	5	Baik
8	Proyektor	2	Baik
9	Kamera Digital	3	Baik



2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka diarahkan untuk tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika Statistik Sektoral dan Persandian tugas pokok dan fungsi mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu Peraturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika serta berpedoman terhadap arah kebijakan Pemerintah baik Nasional maupun Daerah diantaranya adalah Program Nasional, Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Lainnya , dapat pada Tujuan dan Sasaran *sebagaimana daftar (Table : 2.1. Terlampir T.C.23) dan Tabel. 2.2. daftar table TC. 2.4)*

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Sebagai lembaga yang mengelola urusan Komunikasi, Informatika Statistik Sektoral, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka memiliki visi Penyusunan Rencana Strategik diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan kepada tiap-tiap Instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategik. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka tahun 2019-2023 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus



dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Sebagai lembaga yang mengelola urusan komunikasi, informatika dan Statistik Sektoral, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka memiliki visi “ **TERWUJUDNYA MASYARAKAT MAJALENGKA YANG RAHARJA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI** ”

Pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika daerah bertujuan untuk meningkatkan akses informasi publik terhadap proses dan hasil pembangunan di daerah. Kemudahan akses informasi pembangunan sangat mempengaruhi partisipasi publik dalam proses pembangunan, baik sebagai pelaku maupun objek pembangunan. Sasarannya adalah meningkatnya wawasan masyarakat terhadap proses-proses pembangunan yang tengah dan telah dilaksanakan, sehingga mereka mampu memanfaatkan berbagai peluang dan hasil pembangunan bagi peningkatan taraf kehidupannya.

Di samping itu, infrastruktur komunikasi dan informatika sangat vital sebagai prasarana untuk meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. Di Kabupaten Majalengka telah terkoneksi Jaringan Internet di SKPD yang ditunjang oleh peningkatan kualitas kinerja SDM melalui kegiatan bimbingan teknis secara berkala. Media website OPD sangat dibutuhkan bagi masyarakat dalam rangka memudahkan akses partisipasi pembangunan dalam berbagai bidangnya. Bagi SKPD, website merupakan sarana ekspos kinerja kepada berbagai pihak terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan.

Berikut ini adalah data domain website di beberapa Kecamatan dan SKPD di Kabupaten Majalengka :



Data Domain Website Kecamatan di Kabupaten Majalengka

NO	KECAMATAN	WEBSITE
1.	Majalengka	majalengka.kec.majalengkakab.go.id
2.	Cigasong	cigasong.kec.majalengkakab.go.id
3.	Panyingkiran	panyingkiran.kec.majalengkakab.go.id
4.	Dawuan	dawuan.kec.majalengkakab.go.id
5.	Kasokandel	kasokandel.kec.majalengkakab.go.id
6.	Ligung	ligung.kec.majalengkakab.go.id
7.	Palasah	palasah.kec.majalengkakab.go.id
8.	Leuwimunding	leuwimunding.kec.majalengkakab.go.id
9.	Rajagaluh	rajagaluh.kec.majalengkakab.go.id
10.	Sindang	sindang.kec.majalengkakab.go.id
11.	Sukahaji	sukahaji.kec.majalengkakab.go.id
12.	Maja	maja.kec.majalengkakab.go.id
13.	Talaga	talaga.kec.majalengkakab.go.id
14.	Cikijing	cikijing.kec.majalengkakab.go.id
15.	Banjaran	banjaran.kec.majalengkakab.go.id



Data Domain Website Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka

NO	OPD	WEBSITE
1.	Sekretariat Daerah	setda.majalengkakab.go.id
2.	Inspektorat	inspektorat.majalengkakab.go.id
3.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	bappelitbangda.majalengkakab.go.id
4.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	bkad.majalengkakab.go.id
5.	Badan Kepegawaian dan Peng- embangan Sumber Daya Manu- sia	bkpsdm.majalengkakab.go.id
6.	Dinas Pendidikan	disdik.majalengkakab.go.id
7.	Dinas Pertanian dan Perikanan	distankan.majalengkakab.go.id
8.	Dinas Perdagangan	dinasperdagangan.majalengkakab.go.id
9.	Dinas Pemberdayaan Masyara- kat dan Desa	dinaspmd.majalengkakab.go.id
10.	Dinas Pemberdayaan Perempu- an, Perlindungan Anak dan Keluar- ga Berencana	dp3akb.majalengkakab.go.id
11.	Dinas Tenaga Kerja dan Perind- ustrian	disnakerin.majalengkakab.go.id
12.	Dinas Sosial	dinsos.majalengkakab.go.id
13.	Dinas Lingkungan Hidup	lh.majalengkakab.go.id
14.	Dinas Pangan	dinaspangan.majalengkakab.go.id
15.	Dinas Kesehatan	dinkes.majalengkakab.go.id
16.	Dinas Kearsipandan Perpustak- aan	diskapus.majalengkakab.go.id
17.	Dinas Pariwisata dan Kebuday- aan	disparbud.majalengkakab.go.id
18.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	dispورا.majalengkakab.go.id
19.	Dinas Komunikasi dan Inform- atika	diskominfo.majalengkakab.go.id
20.	Dinas Perhubungan	dishub.majalengkakab.go.id



21.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	disdukcapil.majalengkakab.go.id
22.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.majalengkakab.go.id
23.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	kesbangpol.majalengkakab.go.id
24.	Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka	rsudmajalengka.majalengkakab.go.id
25.	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres	rsudcideres.majalengkakab.go.id

Berikut ini adalah data layanan sistem elektronik di Kabupaten Majalengka sampai dengan tahun 2018 :

Data Layanan Sistem Elektronik di Kabupaten Majalengka

No	Nama Aplikasi	Deskripsi	OPD Penanggungjawab	Alamat Web
1.	RKPD Online	Pengelolaan RKPD Kab. Majalengka	Bappelitbangda	http://rkpdonline.majalengkakab.go.id/
2.	PBB Online	Pengelolaan PBB	BKAD	http://pospbb.majalengkakab.go.id/
3.	BPHTB Online	Pengelolaan BPHTB	BKAD	http://pbb-bphtb.majalengkakab.go.id/
4.	SIMBADA	Pengelolaan Barang Daerah	BKAD	http://aset.majalengkakab.go.id
5.	SAPKD	Pengelolaan Kepegawaian Daerah	BKPSDM	http://bkpsdm.majalengkakab.go.id/sapk/
6.	PPKNS	Penilaian Kinerja PNS	BKPSDM	http://bkpsdm.majalengkakab.go.id/ppkns/
7.	SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	-
8.	SIKD	Pengelola Keuangan Daerah	BKAD	https://sikd.majalengkakab.go.id
9.	SIMPEL	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Kepegawaian	BKPSDM	http://bkpsdm.majalengkakab.go.id/simpel/
10.	TMC	Pemantau Lalu Lintas	Dishub	http://tmc.majalengkakab.go.id/
11.	PPID	Pelayanan Informasi Publik	Dinas Kominfo	http://ppid.majalengkakab.go.id/
12.	JDIH	Sistem Informasi Hukum	Setda	http://jdih.majalengkakab.go.id/
13.	LPSE	Pengadaan Barang dan Jasa	Setda	http://lpse.majalengkakab.go.id/
14.	HALO BIDAN	Pengelolaan Sistem Rujukan	Dinas Kesehatan	http://rujukan.majalengkakab.go.id/
15.	SICEPOT	Sistem Informasi PKB	Dishub	-
16.	TNDE	Tata Naskah Dinas Elektronik (e-office)	Setda	http://eoffice.majalengkakab.go.id/
17.	EMAIL	Pengelolaan Email SKPD Daerah	Dinas Kominfo	http://mail.majalengkakab.go.id



18.	SIMASDIK	Aplikasi Aset BMD	Dinas Pendidikan	http://asetdisdik.majalengkakab.go.id/
19.	SIMPATDA	Pengelolaan PAD	BKAD	-
20.	SP2D	Pengelolaan SP2D	BKAD	http://sp2donline.majalengkakab.go.id
21.	SISTEM INFORMASI KEARSIPAN	Pengelolaan Arsip	Dinas Arsip dan Perpustakaan	-
22.	IPBB	Aplikasi PBB Online Berbasis Android	BKAD	-
23.	SISMIOP	Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak	BKAD	-
24.	SIGINCU	Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi & Terpadu	Dinas Kesehatan	http://dinkes.majalengkakab.go.id/
25.	SINDANGMAS	Sistem Informasi Cadangan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan	http://dinaspangan.majalengkakab.go.id
26.	LAKIP Online	Pengelolaan LAKIP Kab. Majalengka	Bappelitbangda	http://lakiponline.majalengkakab.go.id/
27.	Satu Data Majalengka	Pengelolaan Data Sektoral Kab. Majalengka	Bappelitbangda	http://satudata.majalengkakab.go.id/
28.	DAPODIK	Data DAPODIK	Dinas Pendidikan	http://disdik.majalengkakab.go.id/dapodik/
29.	SIMBOS	Aplikasi Pengelolaan BOS	Dinas Pendidikan	-
30.	Media Digital	Aplikasi Penyimpanan Bahanajar	Dinas Pendidikan	http://mediadigital.majalengkakab.go.id/
31.	Ujian Online	Aplikasi Ujian Online	Dinas Pendidikan	http://ujianonline.majalengkakab.go.id/
32.	Siladdu	Sistem Informasi Pelayanan Desa dan Data Terpadu	Dinas Kominfo	-
33.	Sipema	Sistem Informasi Perizinan Mandiri	DPMTSP	http://sipema.majalengkakab.go.id/
34.	Sistem Perizinan BPPTPM	Sistem Perizinan BPPTPM	DPMTSP	-
35.	SIMDATIK	Sistem Informasi Data Statistik Pertanian	Distankan	http://simdatik.majalengkakab.go.id
36.	SIMARDI	Sistem Informasi Arsip Dinamis Distankan	Distankan	-
37.	Pusdatin Pertanian	Pusat Data dan Informasi Pertanian	Distankan	http://pusdatin.majalengkakab.go.id
38.	Siduga	Sistem Informasi Kependudukan & Keluarga	DP3AKB	-
39.	SIMRS	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	RSUD Cideres	-
40.	SIMRS	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	RSUD Majalengka	-
41.	SISKOTKLN	Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri	Disnakerin	-
42.	Informasi Pasar Kerja	Informasi Pasar Kerja	Disnakerin	-
43.	SIM PKH	Sistem Informasi Manajemen Program Keluarga Harapan	Dinas Sosial	-
44.	Siskeudes	Sistem Informasi Keuangan Desa	Dinas PMD	http://dinaspmd.majalengkakab.go.id
45.	Si Jempol	Sistem Informasi Perizinan Online	DPMTSP	http://sijempol.majalengkakab.go.id
46.	Majalengka Open Data	Aplikasi Data Statistik Sektoral Majalengka	Dinas Kominfo	http://data.majalengkakab.go.id



Lingkup pengelolaan teknologi informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah pengawasan dan pengendalian infrastruktur komunikasi dan informatika, pengembangan server pusat informasi, dan pembinaan kapasitas SDM pengelola teknologi informasi dan Pengembangan Intercom dua arah (Vidcon)

Bagian dari aktivitas pengawasan dan pengendalian infrastruktur komunikasi dan informatika adalah upaya identifikasi dan pengendalian pendirian menara telekomunikasi yang dibangun oleh berbagai provider seluler. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bahwa Menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara. Pemberian Izin Mendirikan Menara wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa sampai dengan tahun 2017-2018 di Kabupaten Majalengka terdapat 238 titik menara telekomunikasi dari 12 provider dengan rincian sebagai berikut.

JUMLAH MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN MAJLENGKA

NO	Provider	Jumlah Menara Terbaru 2017 (Setelah Akusisi)
1	TELKOMSEL	63
2	TBG	55
3	PROTELINDO	42
4	XL	17
5	INDOSAT	12
6	SIP	3
7	TELKOM	5
8	STP	12
9	MITRATEL	19
10	IBS	8
11	INDOSIAR	1
12	NARAGITA	1
TOTAL		238



DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA

NO	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	TELKOMSEL	MAJA	Anggrawati	2003	72
2	TELKOMSEL	ARGAPURA	Argalingga	2007	52
3	TELKOMSEL	ARGAPURA	Mekarwangi	2009	52
4	TELKOMSEL	BANJARAN	Sunia	2008	42
5	TELKOMSEL	BANTARUJEG	Babakan Sari	2005	72
6	TELKOMSEL	Malausma	Cimuncang	2008	52
7	TELKOMSEL	Malausma	Girimukti	2008	62
8	TELKOMSEL	CIGASONG	Cigasong	2002	72
9	TELKOMSEL	CIKIJING	Banjaransari	2005	72
10	TELKOMSEL	CIKIJING	Sindang	2007	36
11	TELKOMSEL	CINGAMBUL	Cikondang	2005	72
12	TELKOMSEL	CINGAMBUL	Cintaasih	2007	62
13	TELKOMSEL	DAWUAN	Bojong Cideres	2001	42
14	TELKOMSEL	DAWUAN	Baturuyuk	2004	42
15	TELKOMSEL	DAWUAN	Balida	2007	42
16	TELKOMSEL	JATITUJUH	Jatitujuh	2004	72
17	TELKOMSEL	JATIWANGI	Pinangraja	2004	72
18	TELKOMSEL	LIGUNG	Beusi	2006	42
19	TELKOMSEL	JATIWANGI	Burujul Wetan	2008	42
20	TELKOMSEL	KADIPATEN	Heuleut	2007	42
21	TELKOMSEL	KADIPATEN	Babakan Anyar	2008	42
22	TELKOMSEL	KASOKANDEL	Leuwikidang	2007	36
23	TELKOMSEL	KASOKANDEL	Jatimulya	2007	72
24	TELKOMSEL	DAWUAN	Sinarjati	2007	36
25	TELKOMSEL	KASOKANDEL	Ranji Kulon	2008	42
26	TELKOMSEL	KERTAJATI	Kertajati	2005	72
27	TELKOMSEL	KERTAJATI	Kertawinagun	2006	42
28	TELKOMSEL	LEMAHSUGIH	Lemahputih	2005	72
29	TELKOMSEL	LEMAHSUGIH	Borogojol	2006	72
30	TELKOMSEL	LEMAHSUGIH	Kalapadua	2007	62
31	TELKOMSEL	LEUWIMUNDING	Ciparay	2005	72
32	TELKOMSEL	LEUWIMUNDING	Parakan	2007	36
33	TELKOMSEL	LEUWIMUNDING	Rajawangi	2008	42
34	TELKOMSEL	LIGUNG	Ligung Lor	2005	72
35	TELKOMSEL	LIGUNG	Buntu	2007	42
36	TELKOMSEL	LIGUNG	Ampel	2008	36
37	TELKOMSEL	MAJA	Cihaur	2006	72
38	TELKOMSEL	MAJA	Maja Utara	2006	72
39	TELKOMSEL	MAJALENGKA	Kawunggirang	2006	62
40	TELKOMSEL	MAJALENGKA	Majalengka Kulon	2006	42
41	TELKOMSEL	MAJALENGKA	Sidamukti	2007	62
42	TELKOMSEL	MAJALENGKA	Majalengka Wetan	2007	42
43	TELKOMSEL	MALAUSSMA	Malausma	2006	72
44	TELKOMSEL	JATIWANGI	Loji	2002	36
45	TELKOMSEL	PALASAH	Waringin	2005	62
46	TELKOMSEL	PALASAH	Enggalwangi	2007	42
47	TELKOMSEL	PANYINGKIRAN	Panyingkiran	2004	62
48	TELKOMSEL	RAJAGALUH	Rajagaluh	2003	36
49	TELKOMSEL	RAJAGALUH	Payung	2008	62
50	TELKOMSEL	SINDANG	Pasirayu	2008	62
51	TELKOMSEL	SINDANG	Indrakila	2008	72
52	TELKOMSEL	SINDANGWANGI	Ujung berung	2007	42
53	TELKOMSEL	SUKAHAJI	Cikoneng	2005	72
54	TELKOMSEL	TALAGA	Margamukti	2008	62
55	TELKOMSEL	SUKAHAJI	Babakan Manjeti	2008	36
56	TELKOMSEL	SUKAHAJI	Jayi	2008	42
57	TELKOMSEL	SUMBERJAYA	Garawangi	2005	72
58	TELKOMSEL	SUMBERJAYA	Sepat	2007	42
59	TELKOMSEL	SUMBERJAYA	Cidenok	2007	42
60	TELKOMSEL	TALAGA	Ganeas	2002	42
61	TELKOMSEL	TALAGA	Talaga Kulon	2007	36
62	TELKOMSEL	TALAGA	Mekaraharja	2007	36
63	TELKOMSEL	LEUWIMUNDING	Tanjung Sari	2014	32



DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA

NO	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	TBG	ARGAPURA	Argalingga	2007	72
2	TBG	BANJARAN	Jami Demang	2007	72
3	TBG	BANTARUJEG	Babakan Sari	2005	70
4	TBG	CIGASONG	Pasukan Sindang Kasih	2007	72
5	TBG	CIGASONG	Kutamanggu	2008	42
6	TBG	DAWUAN	Genteng	2004	70
7	TBG	KASOKANDEL	Leuwi Kidang	2007	72
8	TBG	JATITUJUH	Jatitengah	2005	70
9	TBG	JATITUJUH	Sumber Kulon	2008	52
10	TBG	JATIWANGI	Blok Pajaten	2005	55
11	TBG	JATIWANGI	Brujul Wetan	2007	72
12	TBG	KADIPATEN	Heuleut	2007	72
13	TBG	KADIPATEN	Babakan Anyar	2007	72
14	TBG	KERTAJATI	Dusun Babakan	2005	72
15	TBG	KERTAJATI	Blok Desa	2007	72
16	TBG	KERTAJATI	Pasir Ipiis	2007	72
17	TBG	LEMAHSUGIH	Lemahputih	2005	70
18	TBG	LEUWIMUNDING	Blok Rebo	2005	70
19	TBG	LIGUNG	Bantar Waru	2005	70
20	TBG	LIGUNG	Sukawera	2008	42
21	TBG	MAJALENGKA	Sidamukti	2007	72
22	TBG	PALASAH	Waringin	2007	72
23	TBG	SINDANGWANGI	Sindangwangi	2007	52
24	TBG	SUKAHAJI	Cikoneng	2004	70
25	TBG	SUKAHAJI	Tanjungsari	2005	70
26	TBG	SINDANG	Indrakila	2007	72
27	TBG	RAJAGALUH	Rajagaluhlor	2007	62
28	TBG	SUMBERJAYA	Paningkiran	2007	42
29	TBG	TALAGA	Gunung Manik	2008	72
30	TBG	JATIWANGI	Sutawangi	2007	70
31	TBG	DAWUAN	Genteng	2007	72
32	TBG	TALAGA	Gunung Manik	2010	52
33	TBG	Argapura	Sadasari	2010	52
34	TBG	MALAUSMA	Lebakwangi	2010	52
35	TBG	BANTARUJEG	Cikidang	2011	52
36	TBG	BANTARUJEG	Bantarujeg	2011	52
37	TBG	LEUWIMUNDING	Ciparay	2011	42



DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA

NO	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	PROTELINDO	BANJARAN	Girimulya	2007	64
2	PROTELINDO	CIGASONG	Lingkung Sangraja	2007	64
3	PROTELINDO	CIKIJING	Banjaransari	2007	64
4	PROTELINDO	CIKIJING	Sukamukti	2008	64
5	PROTELINDO	CINGAMBUL	Cingambul	2007	54
6	PROTELINDO	KADIPATEN	Karangsambung	2007	54
7	PROTELINDO	JATIWANGI	Burujul Wetan	2006	70
8	PROTELINDO	MAJA	Maja Selatan	2007	54
9	PROTELINDO	MAJALENGKA	Majalengka Kulon	2007	45
10	PROTELINDO	MAJALENGKA	Lingkungan Mekarguna/Td	2007	35
11	PROTELINDO	PALASAH	Majasuka	2007	54
12	PROTELINDO	PANYINGKIRAN	Panyingkiran	2007	65
13	PROTELINDO	RAJAGALUH	Rajagaluh Lor	2007	54
14	PROTELINDO	SINDANGWANGI	Lengkong Wetan	2007	54
15	PROTELINDO	TALAGA	Talaga Wetan	2012	30
16	PROTELINDO	JATIWANGI	Andir	2012	46
17	PROTELINDO	KADIPATEN	Liangjulung	2012	30
18	PROTELINDO	SUMBERJAYA	Rancaputat	2012	40
19	PROTELINDO	DAWUAN	Genteng	2012	40
20	PROTELINDO	JATIWANGI	Cicadas	2012	30
21	PROTELINDO	KADIPATEN	Pagandon	2012	40
22	PROTELINDO	CIKIJING	Sindangpanji	2012	46
23	PROTELINDO	TALAGA	Talaga Kulon	2012	40
24	PROTELINDO	BANJARAN	Sindangpala	2012	40
25	PROTELINDO	JATITUJUH	Putri Dalem	2011	55
26	PROTELINDO	JATITUJUH	Biyawak	2011	55
27	PROTELINDO	LIGUNG	Beber	2011	55
28	PROTELINDO	MAL AUSMA	Jagamulya	2011	70
29	PROTELINDO	RAJAGALUH	Payung	2011	70
30	PROTELINDO	SINDANG	Pasirayu	2011	70
31	PROTELINDO	JATITUJUH	Pilangsari	2011	75
32	PROTELINDO	KERTAJATI	Babakan	2011	70
33	PROTELINDO	KADIPATEN	Karangsambung	2013	50
34	PROTELINDO	PANYINGKIRAN	Pasirmuncang	2014	60
35	PROTELINDO	CIGASONG	Cicienang	2014	30
36	PROTELINDO	ARGAPURA	Sagara	2014	40
37	PROTELINDO	TALAGA	Lampuyang	2014	70
38	PROTELINDO	CIKIJING	Cidulang	2014	40
39	PROTELINDO	CIGASONG	Cigasong	2014	30
40	Ex. XL	LIGUNG	Ligung Lor	2005	70
41	Ex. XL	MAJA	Wanahayu	2005	71
42	Ex. XL	SUKAHAJI	Tanjung Sari	2008	50



DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA

NO	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	XL	CIKIJING	Sukamukti	2004	70
2	XL	KASOKANDEL	Gunungsari	2006	51
3	XL	JATITUJUH	Jatitengah	2005	70
4	XL	JATIWANGI	Sutawangi	2003	70
5	XL	KADIPATEN	Kadipaten	2008	70
6	XL	LEUWIMUNDING	Leuwimunding	2005	70
7	XL	MAJALENGKA	M.Wetan	2002	70
8	XL	MAJALENGKA	Munjul	2006	51
9	XL	SINDANGWANGI	Leuwilaja	2005	71
10	XL	SUMBERJAYA	Bongas Kulon	2005	51
11	XL	TALAGA	Talaga Wetan	2008	70
12	XL (EX ATI)	CIGASONG	Tajur	2009	62
13	XL (EX ATI)	CIGASONG	Baribis	2009	52
14	XL (EX ATI)	CINGAMBUL	Cikondang	2009	72
15	XL (EX ATI)	JATIWANGI	Sutawangi	2008	72
16	XL (EX ATI)	MAJA	Tegalsari	2008	62
17	XL (EX ATI)	SUKAHAJI	Palabuhan	2009	52

DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA

NO	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	INDOSAT	ARGAPURA	Kebon Jati	2004	100
2	INDOSAT	CIKIJING	Cimukti	2004	70
3	INDOSAT	CINGAMBUL	Blok Jumat	2005	70
4	INDOSAT	JATIWANGI	Jl. Olahraga	1997	55
5	INDOSAT	KERTAJATI	Mekarjaya	2008	52
6	INDOSAT	LIGUNG	Desa Buntu	2007	55
7	INDOSAT	MAJALENGKA	majalengka wetan	1997	55
8	INDOSAT	SINDANGWANGI	Lontang Sari	2004	70
9	INDOSAT	SUMBERJAYA	Bongas Wetan	2004	70
10	INDOSAT	TALAGA	Blok Cipeucang	2004	100
11	INDOSAT	LEMAHSUGIH	Margajaya	2008	42
12	INDOSAT	LEMAHSUGIH	Borogojol	2008	52

DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA

NO	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	SIP	CIKIJING	Cikijing	2007	60
2	SIP	MAJA	Maja	2007	53
3	SIP	JATITUJUH	Pangkalanpari	2011	71



DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA

NO	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	TELKOM	CIKIJING	Cipasung	2012	30
2	TELKOM	JATIWANGI	Mekarsari	2012	36
3	TELKOM	MAJALENGKA	Majalengka Wetan	2012	42
4	TELKOM	DAWUAN	Dawuan	2012	36
5	TELKOM	RAJAGALUH	Rajagaluhlor	1996	36

DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA

NO	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	STP	JATIWANGI	Ciborelang	2012	52
2	STP	LEMAHSUGIH	Margajaya	2014	72
3	STP	JATITUJUH	jatitujuh	2007	71
4	STP	PALASAH	Sindangwasa	2011	51
5	STP (EX XL)	BANTARUJEG	Babakan Sari	2005	71
6	STP (EX XL)	KERTAJATI	Babakan	2005	70
7	STP (EX XL)	LEMAHSUGIH	Lemahputih	2005	71
8	STP (EX XL)	MAJA	Cihaur	2006	51
9	STP (EX XL)	MAJALENGKA	Sida Mukti	2007	51
10	STP (EX XL)	PALASAH	Waringin	2006	51
11	STP (EX XL)	PANYINGKIRAN	Karyamukti	2007	51
12	STP (EX XL)	SUKAHAJI	Cikoneng	2005	71

DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA

NO	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	MITRATEL	LIGUNG	Cibogor	2012	42
2	MITRATEL	SINDANG	Sindang	2014	62
3	MITRATEL	ARGAPURA	Argalingga	2014	62
4	MITRATEL	MAJALENGKA	Cibodas	2014	72
5	MITRATEL	LEMAHSUGIH	mekarwangi	2014	42
6	MITRATEL	LEUWIMUNDING	karang Asem	2014	42
7	MITRATEL	DAWUAN	Genteng	2016	36
8	MITRATEL	MAJALENGKA	Majalengka Kulon	2016	22
9	MITRATEL	MAJALENGKA	Majalengka Kulon	2016	42
10	Ex. WMI	RAJAGALUH	Rajagaluh Kidul	2011	52
11	Ex. Java Indoku	RAJAGALUH	Kumbang	2011	36
12	Ex. Java Indoku	PALASAH	Waringin	2011	42
13	Ex. Java Indoku	SUMBERJAYA	Bongas	2011	42
14	MITRATEL	CIKIJING	Banjaransari	2017	42
15	MITRATEL	LEMAHSUGIH	Cigaleuh	2017	42
16	MITRATEL	KASOKANDEL	Gunungsari	2017	42
17	MITRATEL	JATIWANGI	Loji	2017	52
18	MITRATEL	LEMAHSUGIH	Sukamaju	2017	52
19	MITRATEL	TALAGA	Jatipamor	2017	52

**DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	IBS	Cikijing	Sindang	2007	72
2	IBS	Maja	Cihaur	2007	92
3	IBS	Leuwimunding	Mirat	2007	72
4	IBS	Jatiwangi	Jatiwangi	2007	82
5	IBS	Maja	Sindangkerta	2007	72
6	IBS	Majalengka	Majalengka Kulon	2007	72
7	IBS	Majalengka	Majalengka Wetan	1998	72
8	IBS	Cingambul	Cingambul	2007	72

DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA

NO	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	INDOSIAR	SUKAHAJI	Padahanten	2013	52

DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA

NO	NOMOR	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1		NARAGITA	KADIPATEN	Liangjulung	2014	42

2.4.1 CYBER CITY

Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia selalu berjalan dari masa ke masa. Sebagai Negara yang sedang berkembang, selalu mengadopsi berbagai teknologi informasi hingga akhirnya tiba di suatu masa di mana penggunaan internet mulai menjadi “makanan” sehari-hari yang dikenal dengan teknologi berbasis internet (*internet based technology*). Saat ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sedang menuju pada era cyber city, yang melibatkan sektor pemerintah (*government*) selaku fasilitator, sektor publik (*citizen*) selaku pengguna layanan informasi dan komunikasi, dan sektor komunitas (*business*) selaku mitra pemerintah dalam melakukan berbagai terobosan dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi didalam cyber city merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan di berbagai sektor kehidupan dimana juga memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen pendidikan,



kesehatan, tenaga kerja, sosial, lingkungan, UKM (Usaha Kecil Menengah), perhubungan dan perizinan. Oleh karena itu sangatlah penting peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) TIK, mulai dari keterampilan dan pengetahuan, perencanaan, pengoperasian, perawatan dan pengawasan, serta peningkatan kemampuan TIK para pimpinan di lembaga pemerintahan, pendidikan, UKM (Usaha Kecil Menengah) dan komunitas TIK. Sehingga pada akhirnya akan dihasilkan output yang sangat bermanfaat baik bagi manusia sebagai individu itu sendiri maupun bagi semua sektor kehidupan.

A. Korelasi antara pemerintah (government), business (komunitas) dan citizen (publik) di dalam Implementasi cyber city antara lain :

1. *Government to Government* (Hubungan pemerintah dengan lembaga pemerintah)
 - a. Menyediakan fasilitas jaringan interkoneksi antar lembaga pemerintah, untuk mempercepat pertukaran data
 - b. Menyediakan sistem aplikasi *e-government* untuk layanan masyarakat.
 - c. Menyediakan layanan *content* untuk layanan informasi bagi masyarakat.
2. *Government to bussines* (Hubungan pemerintah dengan komunitas)
 - a. Melakukan kerjasama dengan berbagai komunitas TIK sebagai industri kreatif TIK untuk bersama-sama melakukan inovasi layanan masyarakat.
 - b. Pemerintah memberikan kesempatan dan peluang seluas-luasnya bagi komunitas TIK untuk pengembangan diri dan menciptakan produk-produk layanan publik berbasis TIK.
 - c. Pemerintah bersama komunitas TIK menumbuhkembangkan potensi daerah menuju masyarakat yang lebih maju dan meningkatkan daya saing Kabupaten Majalengka.
3. *Government to citizen* (Hubungan pemerintah dengan masyarakat)
 - a. Pemerintah menyediakan layanan informasi dan layanan pengaduan secara responsif bagi masyarakat, sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.



- b. Pemerintah menyediakan aplikasi layanan publik berbasis TIK, seperti layanan kependudukan, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, sosial, lingkungan dan sektor lainnya.

B. *Cyber City* dalam Bidang Kependudukan

1. Penerapan KTP Nasional yang terintegrasi untuk mensukseskan program Nasional yaitu 'Single Identity', layanan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran.
2. Kolaborasi dengan institusi vertikal dan lembaga, untuk menciptakan kemudahan *interoperability* dalam pertukaran data kependudukan, seperti puskesmas, rumah sakit, bank, sekolah, universitas, kantor imigrasi dan lain sebagainya.

C. *Cyber City* dalam Bidang Pendidikan

1. Pengayaan *content digital* berbasis pengetahuan untuk meningkatkan wawasan masyarakat yang mudah diakses melalui berbagai sarana seperti WiFi (*Hotspot*), telepon selular dan sarana komunikasi lainnya.
2. Penyediaan sistem 'Penerimaan Siswa Baru secara OnLine' dan sistem informasi sekolah untuk kemudahan informasi bagi masyarakat terutama orangtua siswa.
3. Layanan pendidikan terbuka dengan cara belajar jarak jauh (*e-learning*) untuk memberikan kemudahan dalam bentuk diskusi/kelas online, konsultasi online dan pustaka digital.
4. Terjadi *sharing resource* (berbagi sumber daya, berbagi hasil penelitian) antar lembaga pendidikan /pelatihan, perpustakaan digital dan instrumen pendidikan lainnya.
5. Penggunaan perangkat informasi interaktif berbasis multimedia, seperti mata pelajaran berbasis multimedia yang secara bertahap menggantikan papan tulis, untuk memberikan kemudahan belajar bagi siswa.

D. *Cyber City* dalam Bidang Kesehatan

1. Kolaborasi dan integrasi dengan data kependudukan untuk memperoleh data warga tidak mampu, sebagai landasan untuk pemrosesan layanan jamkesda.
2. Tersedia interkoneksi dengan apotik dan rumah sakit untuk kemudahan layanan kesehatan dan obat-obatan.

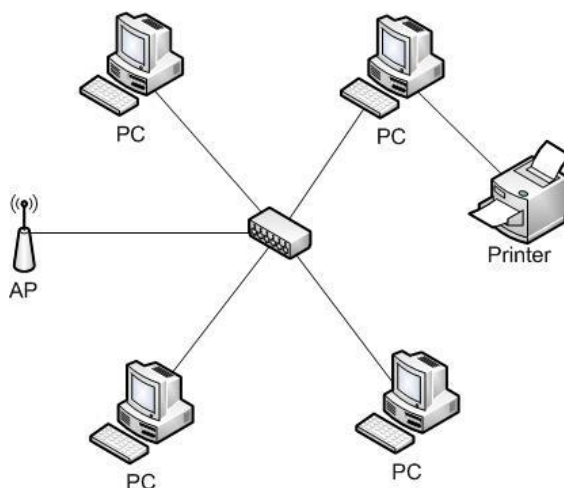
E. *Cyber City* dalam bidang Tenaga Kerja dan Sosial

1. Menyediakan layanan tenaga kerja online yang terintegrasi dengan data kependudukan.
2. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat setempat dengan tersedianya pengetahuan kewirausahaan secara digital.

2.4.2. INFRASTRUKTUR

Dalam perancangan dan pengembangan jaringan, Pemerintah Kabupaten Majalengka akan membangun fasilitas Local Area Network (LAN) di semua institusi Pemerintahan. LAN digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam suatu instansi yang menggunakan peralatan secara bersama-sama dan saling bertukar informasi.

Topologi yang akan digunakan pada masing-masing dinas atau instansi pada Pemerintahan Kabupaten Majalengka adalah Star. Karena sangat sesuai diterapkan untuk melakukan efisiensi dan kinerja jaringan secara keseluruhan tidak akan terganggu jika ada satu computer yang *error/crash*. Selain itu juga karena adanya control terpusar sehingga memudahkan dalam mendeteksi *error* dan adanya upaya penghematan sumber daya yang ada, terutama penggunaan printer bisa dioptimalkan semaksimal mungkin.



Gambar 1 Struktur Umum Jaringan pada Dinas/Instansi



2.4.2.1 Arsitektur Infrastruktur TI

Topologi dan Desain Jaringan

Untuk mendukung berjalannya aplikasi yang akan diterapkan di Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka diperlukan infrastruktur sebagai berikut :

- WAN

Yaitu jaringan yang terdapat di luar jaringan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang berfungsi untuk memfasilitasi para pengguna yang ingin mengakses informasi melalui internet. Jaringan ini diperuntukkan bagi layanan publik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi berupa penyediaan portal dan sistem elektronik terintegrasi yang aman untuk berbagai pengguna dari berbagai kalangan, baik itu pengguna internal dari kalangan pegawai Pemerintah Kabupaten Majalengka maupun pengguna dari luar seperti masyarakat umum.

Pemerintah Kabupaten Majalengka diharapkan mampu memiliki iip publik yang tetap untuk kebutuhan terhadap layanan aplikasi publik.

- Intranet

Yaitu jaringan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk keperluan internal. Jaringan ini akan menopang arus informasi antarinstansi Pemerintahan melalui tukar menukar data serta *file sharing* dari/menjuhu pusat data (*data centre*). Secara lokasi, dapat dibedakan menjadi :

- Pendopo

Jaringan diperuntukkan bagi institusi pemerintahan yang berada di sekitar komplek Pendopo Kabupaten Majalengka, seperti Setda dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

- Luar Pendopo

Jaringan diperuntukkan bagi institusi pemerintahan yang berada di luar komplek Pendopo Kabupaten Majalengka, seperti Dinas Pendidikan, Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD), Sekretariat Dewan, dan lain-lain.

Perlu dilakukan penyempurnaan pembangunan jaringan *backbone* sebagai tulang punggung lalu lintas data antar SKPD mengingat kebutuhan akan informasi data yang semakin meningkat. Pola



pembangunan backbone dilakukan dengan mengelompokkan SKPD yang berdekatan. SKPD-SKPD tersebut disatukan dengan interkoneksi jaringan antar SKPD baik berupa jaringan wireless atau jaringan Fiber Optik. Kemudian terhubung dengan pusat data (data centre) pengaturan lalu lintas data dikendalikan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai penanggung jawab utama.

- DMZ

Demilitarized Zone (DMZ) merupakan pintu gerbang terhadap jaringan luar (internet) yang berfungsi untuk mengamankan Intranet terhadap serangan dari luar. Computer-komputer pada jaringan DMZ merupakan komputer-komputer yang perlu dihubungi secara langsung oleh pihak luar. Contohnya adalah *access server*, *Proxy Server*, dan lain-lain.

Aplikasi-aplikasi yang digunakan pada host dalam jaringan DMZ harus dikategorikan sebagai aplikasi yang aman, dipantau dan di-*update* secara regular. Aturan-aturan yang melekat pada DMZ yaitu :

- Pihak luar hanya dapat berhubungan dengan host yang berada pada jaringan DMZ saja dan disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Secara *default*, pihak luar tidak bisa melakukan hubungan secara langsung dengan host pada jaringan DMZ.
- Host pada jaringan DMZ secara *default* tidak dapat berhubungan dengan host pada jaringan internal. Koneksi secara terbatas dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- Host pada jaringan internal dapat melakukan koneksi secara bebas baik ke jaringan luar maupun ke jaringan DMZ. Pada beberapa implementasi khusus, untuk meningkatkan keamanan, host pada jaringan internal tidak dapat melakukan koneksi ke jaringan luar, melainkan melalui perantara host pada jaringan DMZ, sehingga pihak luar tidak mengetahui keberadaan host pada jaringan internal.

Pada gateway diberikan fasilitas VPN (Virtual Private Network) untuk menjaga kerahasiaan pengiriman data baik voice maupun non voice dari



dan ke luar jaringan Pemerintahan Kabupaten Majalengka sedangkan dari sisi komputer klien diberi software VPN Client.

Server Farm berisi server-server seperti Application Server, Database Server, Backup Server, Single Sign On Server, dan lain-lain.

- Instalasi Jaringan

Pengembangan infrastruktur jaringan akan dimulai dari pembangunan infrastruktur jaringan di lingkup NOC sebagai pusat kontrol dan monitor networking. Pembangunan ini meliputi pemasangan wire LAN/FO dan wireless LAN yang mampu menghubungkan NOC dengan SKPD lainnya.

Setelah itu, pengembangan dan pembangunan infrastruktur di luar NOC. Hal ini didasari pada kondisi topografi Kabupaten Majalengka dimana jarak harus diukur secara presisi antara satu SKPD dengan SKPD lainnya. Analisis pengembangan dilakukan untuk mendapatkan beberapa persyaratan komponen jaringan agar dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan koneksi jaringan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Untuk itu, harus dilakukan analisis awal kebutuhan pemasangan dan pengembangan koneksi jaringan.

2.4.3 DATA DAN INFORMASI

Pemerintah Kabupaten Majalengka menekankan pertukaran data dan informasi dengan pemerintah, komunitas dan masyarakat. Dalam penyajian data dan informasi, Pemerintah Kabupaten Majalengka akan mendorong semua institusi OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk memiliki website opd dan sistem elektronik yang dikelola dan dikembangkan sendiri oleh dinas tersebut dan terintegrasi antar SKPD melalui WEB www.majalengkakab.go.id Dalam pelaksanaannya, masing-masing portal OPD itu harus menyediakan layanan pengaduan online.

Pertukaran data dan informasi antara pemerintah dengan pemerintah (G2G) untuk menunjang pelaksanaan PPID, Pemerintah dengan komunitas ditekankan peranan komunitas dalam membantu



pemerintah sebagai mitra pemerintah. Komunitas didorong untuk menghimpun data, pengadaan sistem aplikasi yang bisa dipakai pemerintah dalam meningkatkan layanan, menumbuhkan industri kreatif dan UKM.

Selain itu peranan masyarakat dituntut untuk lebih berpartisipasi dalam mensosialisasikan program pemerintah dan membantu pemerintah menginformasikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi pemerintah. Dinas komunikasi dan informasi sebagai gate way atau jembatan akan menjembatani pertukaran data dan informasi antara Pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan komunitas dan juga pemerintah dengan masyarakat.

Data dan informasi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk keperluan internal dan eksternal. Data dan informasi ini akan menopang arus informasi antar institusi Pemerintahan melalui tukar menukar data serta *file sharing* dari/menuju pusat data (*data centre*).

2.4.4 DISEMINASI INFORMASI

Di masa depan direncanakan peningkatan kualitas pelayanan informasi dan peningkatan kemitraan dengan lembaga terkait, serta pemberdayaan masyarakat dalam penyampaian informasi yang diimplementasikan ke dalam beberapa kegiatan. Mengingat usia Dinas Komunikasi dan Informasi baru dua tahun berdiri maka penambahan fasilitas penyebaran informasi mutlak dibutuhkan, Media Center sebagai suatu ruangan yang berisi meja informasi, papan informasi, komputer dan kelengkapannya, jaringan internet, serta media-media informasi dalam ruangan lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi pembangunan kepada masyarakat, Sedangkan Pembuatan library teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menghimpun dokumentasi foto, film, media informasi cetak yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan informasi.

Mengingat penetrasi internet dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Majalengka mencapai 90% Dinas Komunikasi dan Informasi



merasa perlu meningkatkan akses informasi positif dan meminimalkan akses konten negatif. Sebagai solusi untuk peningkatan akses informasi maka akan diselenggarakan lomba multimedia berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sosialisasi informasi sehat ke sekolah-sekolah, warnet dan media serta penyusunan informasi sehat.

Selain itu untuk memberdayakan masyarakat dalam penyebaran informasi partisipasi masyarakat mutlak dibutuhkan. Proses akses informasi pembangunan akan menjadi bagian dari peran serta masyarakat, yakni melalui pembentukan komunitas informasi masyarakat (KIM) dan pembinaannya. Target penyampaian informasi akan terlaksana dengan baik dengan penyuluhan dari masyarakat untuk masyarakat.

Penyebaran informasi juga tidak akan terlepas dari peran media massa. Kemitraan dengan media massa dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang harmonis sehingga media massa dapat dimanfaatkan sebagai media penyebaran informasi yang efektif. Konferensi pers dan artikel tentang pembangunan diharapkan dapat mengimbangi isu-isu negatif yang dibentuk oleh media massa. Media massa harus terus diinformasikan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Majalengka, sehingga berita yang dihasilkan dapat memberi efek positif bagi pembacanya.



BAB 3

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD.

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Pusat untuk menjamin terselenggaranya diseminasi informasi nasional yang terstruktur, terukur, terintegrasi, transparan, dan terjamin akuntabilitasnya. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud berkenaan dengan; reproduksi dan distribusi paket informasi nasional yang disusun Pemerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, ada 2 tugas pokok urusan bidang yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informasi, adalah : menyelenggarakan pelayanan urusan Wajib pemerintahan Non Pelayanan Dasar 1 (Satu) dibidang Komunikasi dan informatika dan 2 (dua) urusan di bidang Statistik Sektoral dengan Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

Tugas dan Fungsi Urusan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Informasi dan Komunikasi Publik untuk pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
2. Aplikasi Informatika untuk pengelolaan nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah daerah;
3. Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kab /Kota;



4. Layanan Keamanan Informasi e-Government;
5. Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kab/Kota;
6. Layanan Akses Internet dan Intranet;
7. Layanan Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi generik, Spesifik & suplemen yang terintegrasi;
8. Integrasi Layanan publik dan pemerintahan;
9. Terselenggaranya Ekosistem TIK **Smart City**;
10. Penyelenggaraan **Government Chief Informasi Officer (GCIO)**;
11. Pengembangan Sumberdaya TIK pemerintah Kab/Kota dan Masyarakat.

Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi bidang urusan Statistik dan Persandian adalah :

1. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data Statistik Sektoral.
2. Penyelenggaraan Kompilasi produk administrasi.
3. Penyediaan peralatan infrastruktur.
4. Pengembangan sumberdaya manusia bidang Statistik.
5. Pengamanan data dan Informasi Pemerintah Daerah

Karakteristik dan kebutuhan daerah di evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan diseminasi informasi nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi jumlah kegiatan diseminasi, informasi dan data yang didiseminasikan, pengamanan informasi dan data, narasumber yang menyampaikan, lokasi diseminasi, waktu pelaksanaan, dan tanggapan masyarakat terkait informasi yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat / Daerah. bagaimanapun, koordinasi dan kerjasama ke atas tersebut harus dilaksanakan dengan baik sehingga proses distribusi Informasi Nasional di daerah tidak terhambat.

Dalam konteks yang sama, Dinas Komunikasi dan Informatika Provisi Jawa Barat seyogyanya menjalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud terkait dengan, antara lain:

1. Distribusi Informasi Nasional dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi hingga ke tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Masyarakat seperti Kelompok Informasi Masyarakat dan Kelompok Media Tradisional sebagai wadah penyebar informasi pemerintahan dan penyerap aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput;



3. Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID guna menjamin Keterbukaan Informasi Publik dan Kelengkapan Daftar Informasi Publik baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Pengelolaan *e-Government* di Pemerintah Kabupaten Majalengka dimana keselarasan perencanaan pengembangan *e-Government* antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki arti penting;
5. Penyelarasan data Statistik Sektoral dan Persandian;
6. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;

Walaupun koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka telah diinisiasi dan diupayakan dalam Kemitra-kerjaan dalam Pelaksana Program Kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik Sektoral dan Persandian serta koordinasi dan kerjasama pemerintah Pusat dan Provinsi masih perlu ditingkatkan agar dapat pelaksanaan kegiatan berjalan pada satu rel yang sama. sebagaimana diurai di atas, sejumlah hal lain yang berpotensi menghambat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target program atau kegiatannya, antara lain : berikut gambaran pemetaan pemasalahan untuk penentuan Prioritas dan dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana (**daftar table. B. 35 sebagaimana terlampir di bawah ini**)



TABLE . B-35
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS & SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1) Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika		
1 Minimnya Infrastruktur dan SDM di bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1 Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Kabupaten Majalengka yang disebabkan oleh ketimpangan dan perbedaan akibat ketidak seimbangan pertumbuhan TIK yang dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung; 2 Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menghimpun dan mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan internal pemerintah belum sepenuhnya dapat menampung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Komunikasi, Informatika 3 Belum terintegrasinya <i>database</i> dan layanan <i>e-Government</i> Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kurang nya sarana Infrastruktur Komunikasi dan informatika yang mendukung terhadap peningkatan layanan sistem informasi 1 Perlu adakannya sosialisasi dan BinteK tentang Pengembangan TIK dalam membetuk SDM layanan Komunikasi dan Informatika yang handal 1 Perlu sinkronisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dalam Perencanaan dan penganggaran pembangunan Layanan E Government di Daerah
2 Masih rendahnya pemanfaatan dan penguasaan IPTEK oleh Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1 Masih rendahnya kompetensi aparatur negeri sipil yang melakukan layanan informasi kepada publik akan fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika, sehingga masih perlu ditingkatkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perlu diadakan sosialisasi dan BinteK terhadap Masyarakat dalam rangka pemahaman TIK di era globalisasi
3 Belum Meratanya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika di Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Masih kurangnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan; 2 Apatisme sebagian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perlu Perencanaan , penganggaran Sarana Infrastruktur dan pengembangan SDM sampai Kepelosok Pedesaan 1 Masyarakat di pedesaan belum sepenuhnya memahami akan Pentingan TIK
(2) Bidang Urusan Statistik		
1 Masih terdapat sumber /referensi data Pembangunan yang berbeda-beda pada masing-masing OPD dan BPS	<ol style="list-style-type: none"> 1 ketepatan data Statistik setiap OPD belum konsisten terhadap validitas data yang benar-benar di pertanggungjawabkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perlu di buatkan Dokumen Data / Informasi Pembangunan yang Realible setiap tahunnya
2 Masih rendahnya akses masyarakat terhadap data Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1 Masyarakat belum memahaminya manfaatnya akan data Statistik 	<ol style="list-style-type: none"> 2 Perlu media layanan Informasi Publik / data Base Statistik sektoral melalui Akses Jaringan Informasi

Kendala-kendala di atas berpotensi menghambat laju Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam melakukan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan informasi publik guna mewujudkan Keterbukaan



Informasi Publik dan menghambat proses reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efisien melalui pemanfaatan TIK. Konsekuensi logis dari hal ini yakni, ia akan berdampak buruk -baik secara langsung maupun tidak langsung- terhadap, antara lain:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023 ;
2. Perwujudan Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005 - 2025, bahwa RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2014-2018 merupakan tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang. Pada tahapan ketiga pembangunan ini telah ditetapkanlah visi Bupati Majalengka, yaitu “**RAHARJA**” atau “Terwujudnya suatu tatanan masyarakat, pemerintahan, dan pembangunan Majalengka yang **Religius , Adil, Harmonis , Sejahtera**”. Adapun makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Religius : Seluruh Aktivitas Kehidupan Masyarakat Kabupaten Majalengka di jiwai oleh Nilai-nilai keagamaan , mampu menjalankan dan mengamalkan ajaran agama dengan didukung sarana dan prasarana keagamaan yang memadai
- Adil : Perlakuan yang sama terhadap semua kalangan atau golongan tanpa ada diskriminasi sehingga tercipta suasana yang tenang , tertib, bebas dari ancaman, gangguan, ketakutan dan konflik sosial
- Harmonis : Terbangunnya Sinergitas, Keterpaduan Keselarasan antara seluruh pemangku kepentingan (Stakeholders) Pembangunan



Sejahtera : Tercapainya kondisi masyarakat Majalengka yang berkecukupan, bahagia secara lahir dan batin dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup mereka

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, maka telah ditetapkan **Misi** sebagai berikut:

1. Mewujudkan perilaku kehidupan masyarakat beragama sebagai tradisi budaya
2. Meneguhkan Nilai nilai kebangsaan untuk menciptakan Pembangunan yang berkeadilan , rasa aman , tentram dan tertib di masyarakat.
3. Membangun Sinergitas dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur Legislatif, pemerintahan Desa, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Pusat serta serta Pemangku kepentingan lainnya.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Pertanian, Perizinan, Penanaman modal dan sektor sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, Profesional, humanis dan melayani.
5. Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi local untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

Sebagaimana visi dan misi yang tercantum di atas, maka pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika termasuk pada lingkup misi yang 3 (Tiga) yaitu : ***Membangun Sinergitas dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsure Legislatif, pemerintahan Desa, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Pusat serta serta Pemangku kepentingan lainnya.***

Adapun indikasi 9 prioritas program pembangunan bidang komunikasi , Informatika dan statistik dalam rangka menjabarkan misi 3 (Tiga) tidak terlepas dari Isu-isu Strategis draf rancangan RPJMD tahun 2018-2023 : tersebut terdiri atas adalah 3 program dan kegiatan-kegiatan berdasarkan Isu



Strategi yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Program Prioritas Daerah terdapat pada Misi 3 yaitu:
 - a) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi**

- Kegiatan Integrasi Sistem Elektronik Pemerintah Daerah

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Waji Tidak Terkait pelayanan Dasar di bidang Urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik

- a) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Kegiatan :

- 1) Desiminasi Informasi melalui media cetak, Elektronik, pertunjukan rakyat dan wawar keliling
- 2) Pelayanan Informasi Publik
- 3) Peningkatan Kualitas Operasional Pelayanan LPPL Radika
- 4) Pengembangan Komunikasi Pemerintah Daerah
- 5) Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
- 6) Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Media
- 7) Pengelolaan Media Promosi City branding
- 8) Pengelolaan dan Pengembangan Media Informasi melalui Diskominfo Chanel
- 9) Pengembangan dan Pengelolaan Media centre
- 10) Pembangunan, Pengembangan dan Pengendalian E-Government (Sistem Elektronik Pemerintahan)
- 11) Pembangunan Taman Digital Majalengka Raharja
- 12) Pengadaan Kendaraan Layanan Informasi
- 13) Pengadaan Papan Pengumuman/ Billboard
- 14) Pengadaan Sarana Layanan Informasi Publik Luar Ruang (Vidiotron)
- 15) Pengadaan Sarana Layanan TV C1 Media untuk Layanan Media Publik
- 16) Pengadaan Kendaraan Operasional Wasdal Kominfo
- 17) Jumpa Pers dan Kemitraan dengan Media
- 18) Majalengka Media AWARDS



- 19) Pengelolaan Data dan Pengumpulan Aplikasi Sistem Informasi
- 20) Peningkatan Sarana dan Prasarana Alat Komunikasi dan Jaringan Media Informasi

b. Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Telekomunikasi

- 1) Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur TIK
- 2) Pembangunan Perangkat Telekomunikasi Pemerintah Daerah
- 3) Pembangunan dan Pengembangan Wifi Desa
- 4) Pembangunan dan Pengembangan Desa Digital Raharja
- 5) Pembangunan Infrastruktur UMKM Go Online
- 6) Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Akses Informasi dan Komunikasi
- 7) Pembangunan dan Pengembangan Data Centre Pemerintah Daerah
- 8) Pembangunan dan Pengembangan Command Centre Pemerintah Daerah
- 9) Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Akses Informasi dan Komunikasi Menuju Smart City
- 10) Pengembangan Server Pusat Informasi
- 11) Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kominfo
- 12) Pembangunan Interkoneksi Pita Lebar (FO) Antar OPD
- 13) Pembinaan dan Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika

C) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Persandian

- 1) Updating Data Set Statistik Sektoral
- 2) Pembangunan Meta Data statistik Sektoral
- 3) Pengolahan dan Analisis Data A Spasial
- 4) Pengolahan Data Set Statistik Sektoral
- 5) Kajian Data Statistik Sektoral
- 6) Peningkatan Kapasitas SDM Statistik
- 7) Desiminasi Statistik Sektoral melalui Multimedia



- 8) Pembangunan Infrastruktur Statistik Sektoral
- 9) ADM (Anjungan Data Mandiri)
- 10) Optimalisasi Pelayanan Informasi Bina Santel

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA OPD

Fungsi dan Kedudukan Renstra OPD tahun 2014-2018 merupakan dokumen Strategis yang harus mengacu terhadap Perencanaan Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan penjabaran Visi dan Misi Program dan kegiatan serta memperhatikan RPJP daerah Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025, RPJM Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018 serta memperhatikan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra OPD Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, maka tujuan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan Pemerintah Indonesia.

Sasaran pembangunan pada akhir periode 2015 – 2019 disusun dengan 4 fokus utama yaitu:



1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan;
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran;
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran;
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan 4 fokus diatas, sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
2. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan;
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing dan aman;
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dna tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Berdasarkan telaahan Kementrian Komunikasi dan Informatika permasalahan yang berkaitan dengan informasi mengacu kepada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Minimnya informasi edukatif yang sampai ke masyarakat
2. Kurang transparannya informasi dari badan publik kepada masyarakat
3. Tidak meratanya sistem jaringan komunikasi

Berdasarkan hal diatas maka paradikma keterbukaan informasi ditetapkan sebagai berikut :



- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi secara cepat dan handal
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi sebagai hak masyarakat
- c. Mengintegrasikan data dan aplikasi layanan informasi berbasis teknologi informasi
- d. Menyusun pedoman layanan informasi dan komunikasi publik
- e. Melibatkan kelompok informasi masyarakat yang berfungsi sebagai juru penerang (diseminasi) informasi

Dalam proses penyusunannya, pedoman teknis dan sistematika Renstra Dinas mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta mempertimbangkan dokumen perencanaan yang relevan. karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka mempunyai hubungan fungsional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Wilayah perkotaan dicirikan dengan lebih baiknya fasilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, transportasi dan teknologi informasi. Dengan adanya fasilitas yang lebih baik tersebut, maka mobilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan semakin tinggi. Dengan kondisi tersebut, maka tingkat kedewasaan dan tuntutan masyarakat terhadap informasi semakin besar.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola permasalahan tersebut, sehingga permasalahan yang ada tidak menjadi kendala dalam pembangunan kota / Kabupaten .

Di masa depan sangat dibutuhkan aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional dalam menjalankan birokrasi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Memasuki era teknologi informasi yang begitu cepat maka aparatur pemerintah wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi teknis yang baik sehingga dapat mewujudkan layanan e-government



Kabupaten Majalengka mempunyai posisi yang strategis, karena secara geografis terletak pada wilayah pembangunan Metropolitan Cirebon Raya. Saat ini warga Kabupaten Majalengka telah memasuki budaya perkotaan yang dicirikan dengan tingkat pendidikan yang baik, daya kritis yang tinggi, mobilitas yang tinggi, membutuhkan kualitas pelayanan yang baik, efisiensi dan tidak menyukai sikap birokrasi yang lamban.

Kondisi tersebut diatas harus mampu dijawab dengan postur, profil dan kinerja yang profesional dari aparatur Pemerintah Kabupaten Majalengka. Aparatur pemerintah Kabupaten Majalengka sebagai pelaksana dari keputusan dan kebijakan pimpinan daerah menjadi pimpinan dan bawahan diseluruh lembaga, dinas, kantor dan organisasi perangkat daerah yang ada.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, maka PNS akan atau sedang menduduki posisi jabatan struktural harus dapat berperan aktif menjalankan fungsi birokrasi yang di amanahkan, sesuai dengan peraturan peundangan yang berlaku.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
- b. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:



- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;
- c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

1. Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
2. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
3. Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terdiri atas pusat pelayanan kawasan (PPK), pusat pelayanan lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah kabupaten yang kewenangan penentuannya ada pada Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi;
 - b. Memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan
 - c. Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem wilayah kabupaten.
4. Dapat memuat pusat-pusat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL (dengan notasi PKLp);
 - b. Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK); dan
 - c. Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan



pemanfaatan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.

5. Sistem jaringan prasarana kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Majalengka terdapat tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan adapun tujuan dan rencana struktur ruang tersebut adalah;

1. Mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Majalengka;
2. Menyelaraskan antara perkembangan penduduk dan kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana pada setiap wilayah;
3. Mengoptimalkan keterbatasan ketersediaan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, alam, sumber daya binaan, dan sumber daya pembiayaan;
4. Pemecahan persoalan pengembangan wilayah;
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Pertimbangan rencana struktur tata ruang yang ditetapkan adalah:

1. RTRWP Jawa Barat Tahun 2009-2029;
2. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Majalengka;
3. Perkembangan penduduk dan kelengkapan sarana dan prasarana pada tiap wilayah;
4. Keterbatasan Ketersediaan Sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, alam, sumber daya binaan, dan sumber daya pembiayaan;
5. Persoalan teknis Pengembangan Wilayah;
6. Hasil-hasil dialog;
7. Usaha pengembangan wilayah yang mungkin (perlu) dikembangkan;
8. Rencana Pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat di Kertajati;



9. Rencana Pembangunan Jalan TOL CISUMDAWU dan TOL CIKAPALI;
10. Pembangunan Rel Kereta Api Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati-Cirebon.

Pertimbangan rencana baru yang akan berkaitan dengan struktur ruang adalah:

- a. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Kota Majalengka.
- b. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Majalengka
- c. Pembangunan Jalan Lingkar Kadipaten
- d. Pembangunan Jalan tembus Majalengka – Lemahsugih.
- e. Pengembangan Luas Ibu Kota Kabupaten Majalengka (Kec. Majalengka, Cigasong, dan Panyingkiran)
- f. Pengembangan pemanfaatan Waduk Jati Gede.
- g. Pengembangan Kawitwangi (Kawasan Wisata Sindangwangi).
- h. Pengembangan wisata situs Prabu Siliwangi.
- i. Pengaturan tentang kebencanaan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dengan memperhatikan kondisi Kabupaten Majalengka yang berada di wilayah pembangunan Metropolitan Cirebon Raya dari aspek geografis, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang sangat tinggi serta jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Majalengka dikaitkan dengan perkembangan Teknologi Informasi; Maka dalam layanan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi antara lain :

1. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik memiliki makna: segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.



Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan /instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat.

Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan instansi publik negara dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Dalam implementasinya, membutuhkan kesiapan yang cukup memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan informasi publik. Karena selain diperlukannya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi publik, diperlukan adanya pemahaman dan edukasi undang-undang tersebut baik kepada kalangan masyarakat maupun bagi instansi publik yang melakukan pelayanan publik itu sendiri.

2. Komitmen terhadap e-development

Di era globalisasi, teknologi informasi berperan sangat penting. Kemajuan yang pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara maju karena didukung oleh sistem informasi yang mapan. Sebaliknya sistem informasi yang lemah di negara berkembang, termasuk Indonesia, mengakibatkan keterbelakangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Informasi merupakan modal utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menjadi senjata pokok untuk membangun negara/wilayah. Sehingga apabila ingin tetap eksis dalam persaingan global, maka penguasaan terhadap informasi adalah mutlak perlu. Pun demikian dengan kecepatan dan ketepatan informasi, karena cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu berpacu dengan adanya informasi yang lebih baru.

Perkembangan teknologi informasi di Kabupaten Majalengka memerlukan komitmen dari semua pihak, terutama aparat pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat luas sebagai stakeholder.

Membangun sistem informasi dan komunikasi, merupakan proses dinamis yang berkesinambungan dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Sistem yang telah terbangun menjadi bagian integral dalam pembangunan itu sendiri untuk semakin memberikan nilai yang lebih bagi pemilik teknologi itu sendiri.

Peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk selalu mampu menyeimbangkan diri dengan perkembangan teknologi informasi menjadi bagian terpenting dalam membangun sistem informasi pemerintah yang berhasil dan bermanfaat bagi birokrasi dan pemerintah.



BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

1. TUJUAN

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah **Raharja** Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya Bidang Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian tujuan dan sasaran terdapat pada misi ke 3 (Tiga) yaitu Misi ini diarahkan **“Membangun Sinergitas dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur Legislatif, pemerintahan Desa, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Pusat serta serta Pemangku kepentingan lainnya.**

“ untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tujuan 2 Pada Misi 3 (Tiga) yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka sebagai berikut: “ **Meningkatkan Kualitas Layanan Publik** “

;



2. SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran 2 diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuannya yang telah ditetapkan sebagai berikut: “ **Tersusunnya Sistem Aplikasi Yang mendukung E-Government** “ Indikator Sasaran: Aplikasi, Publikasi, Infrastruktur, Data Statistik Sektoral

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah OPD (Daftar Table. TC.25 Sebagaimana Terlampir



Table . CT. 25
 TUJUAN DAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019 -2023
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA

Hal. 01

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2				4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kecepatan Akses Jaringan Komunikasi	Tersusnya Sistem Aplikasi yang mendukung E-Government	Jumlah Aplikasi yang tersambung Jaringan Komunikasi	Buah	113	117	116	116	116
				Jumlah Sarana Layanan Informasi Publik	Buah	12	11	11	11	11
				Jumlah Sarana Infrastruktur Layanan Informasi Publik	Unit	82	80	79	82	82
				Jumlah Desa Teknologi Informasi dan Komunikasi Destika	Desa		151	151	151	151
				Jumlah dokumen dan Informasi Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	Dokumen		3	2	2	2
				Jumlah Dokumen hasil Pengolahan data dan Statistik Sektoral	Dokumen	12	8	8	8	8



				Prosentase Kualitas SDM Statistik Sektoral		100	100	100	100	100
				Jumlah Sarana Pelayanan Data Statistik	Dokumen		5	5	5	5
2	Meningkatkan Kapasitas Kinerja Perangkat Daerah	Katagori Nilai SAKIP OPD	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pegawai yang terpenuhi Kebutuhan Kesejahteraan sesuai dengan Peraturan-perundang undangan	Persen	100	100	100	100	100
				Jumlah sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin Pada Perangkat daerah	Unit	4	4	4	4	4
				Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	100	100	100	100	100
				Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	100	100	100	100	100



				Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	100	100	100	100	100
				Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Dinas Komunikasi dan	Persen	100	100	100	100	100



BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun **strategi** yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka sebagai berikut :

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.

Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel T.C.26 berikut ini :



TABLE . C. 26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : RELIGIUS , ADIL, HARMONIS, SEJAHTERA (RAHARJA)			
MISI (3) : Membangun Sinergitas dan Hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintahan Desa, pemerintahan Provinsi dan pemerintah Pusat serta pemamngku kepentingan lainnya			
TUJUAN	SASARAN	STATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 1:	Sasaran 1	Stategi 1	Arah Kebijakan 1
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Index Kepuasan Masyarakat	Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas dan pemenuhan sarana Pelayanan Publik





BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, maka disusunlah program-program Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kurun waktu 2019-2023 sesuai dengan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 dan telah di ubah dengan undang undang Nomor ; 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Program prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam upaya pencapaian target RPJMD yang harus tercapai pada tahun 2023.

Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik / tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif seperti pada tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T.C.27





BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rumusan Indikator Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ditampilkan dalam table 7.1. yang bersumber dari dari Table T.C. 28.



BAB. VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan Komunikasi, Informatika, Statistik serta Dinas Instansi/ Lembaga Pemerintah Kabupaten Majalengka, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik Sektoral dan persandian

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra menjabarkan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka beserta rencana sasaran pembangunan dalam rangka mencapai sasaran program Kepala Daerah Kabupaten Majalengka. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian indikator, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).



Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Bidang komunikasi, Informasi dan Statistik Sektoral yang hendak dicapai pada periode 2019-2023. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon III dan IV di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dan Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Strategis; Rencana Kerja (Renja); Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian Laporan Tahunan; dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka tahun 2019-2023, diharapkan perencanaan pembangunan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian serta hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan menjadi koridor pelaksanaan Program dan Kegiatan sehingga dapat mencapai target sasaran dan dapat mewujudkan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika, sekaligus juga bisa mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Majalengka. akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Majalengka, Agustus 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka

Drs. MAMAN SUTIMAN

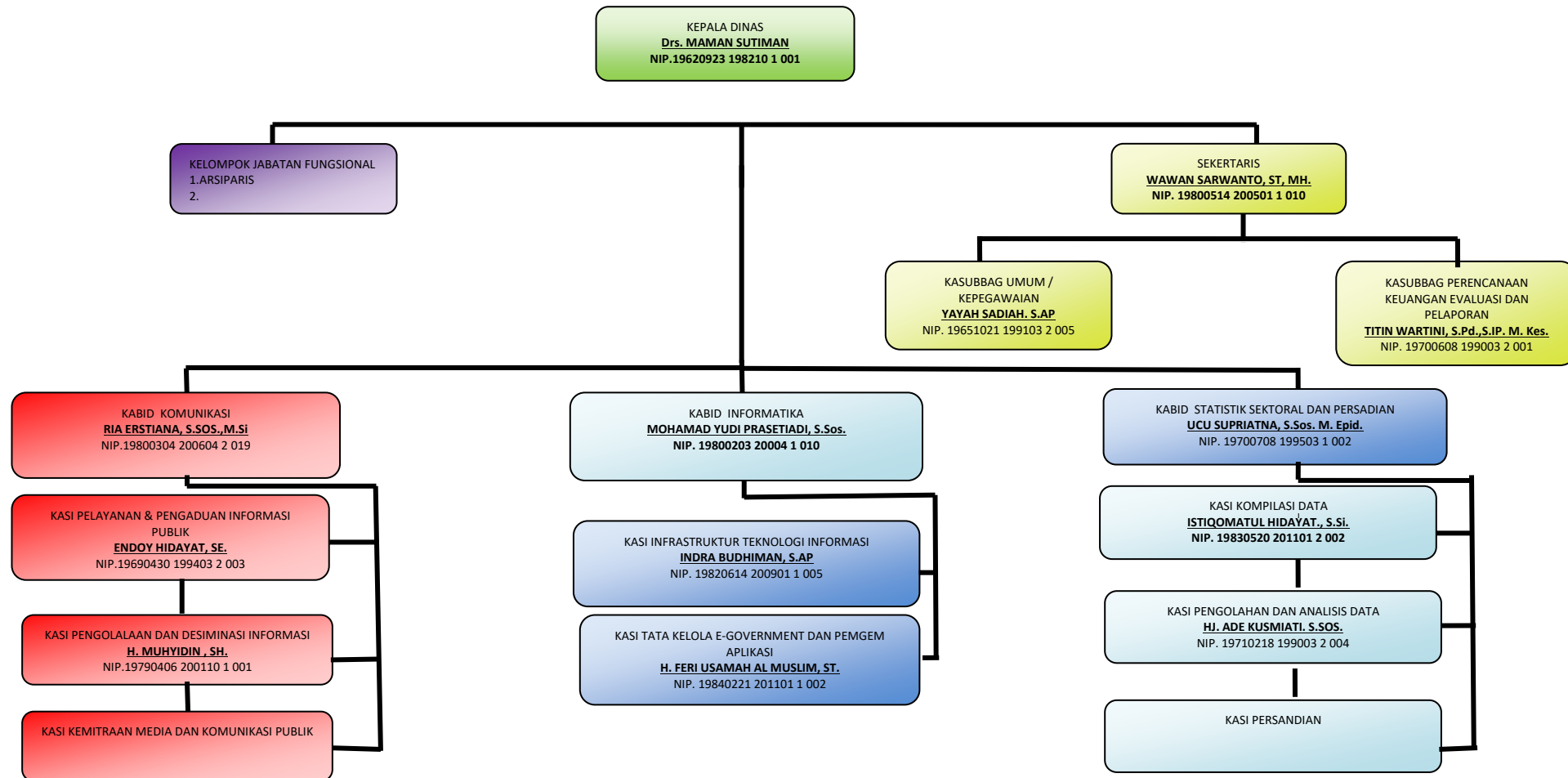
Pembina Utama Muda

NIP. 19620923 198210 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA



Tabel T.C. 27
Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif (DISKOMINFO)
Kabupaten Majalengka

Halaman: 01

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Proram dan kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Jenis Kegiatan						
									Tahun 2019		Tahun-2020		Tahun 2021		Tahun-2022		Tahun-2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD					
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			Target	Rp				
VISI : mewujudkan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS DAN SEJAHTERA																										
MISI: (3) Membangun Sinergi dan Hubungan yang Harmonis dengan Seluruh Mitra Kerja dan Pemangku Kebijakan baik dengan Unsur Legislatif,Pemerintah Desa,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta para Pemangku Kepentingan																										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR																										
(1) URUSAN BIDANG KOMUNIKASI , INFORMATIKA																										
(1.1) PENDUKUNG																										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)					
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika	Kecepatan Akses Jaringan Komunikasi	Tersusunnya Sistem Aplikasi yang mendukung E-Government	Indeks e-Government	1	1	Program Peningkatan sumber daya Aparatur	1	Jumlah Data dan Informasi Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	Dokumen	10	312,500,000										Diskominfo					
				1	1	1	Updating Portal Data	Updating Portal data dan PGD	Kategori	8	162,500,000												Diskominfo			
				1	1	1	2	Kajian data Statistik	Terwujudnya Buku Profil Ekonomi Sosial Daerah, dan Indikator Pembangunan	Buku	2	150,000,000												Diskominfo		
									Jumlah Peningkatan SDM Komunikasi dan Informatika	Orang	50	38,100,000													Diskominfo	
				1	1	1	3	Pembinaan dan pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Majalengka	Orang	50	38,100,000													Diskominfo	
				1	2			Program Peningkatan sarana dan Prasarana Layanan Publik	Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika	Unit	26	867,612,000													Diskominfo	
				1	2	1	1	Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Akses Informasi dan	Terfasilitasinya Interkoneksi Jaringan OPD	Jaringan	7	251,700,000													Diskominfo	
				1	2	1	2	Pengembangan Server Pusat Informasi	Terpeliharanya Server Pusat Informasi	Server	10	124,212,000													Diskominfo	
				1	2	1	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit	2	42,500,000													Diskominfo	
				1	2	1	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Belanja Suku Cadang dan Belanja Jasa Servis	Jenis Kegiatan	2	5,000,000													Diskominfo	
1	2	1	6	Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kominfo	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kominfo	Jenis Kegiatan	4	244,200,000														Diskominfo				

				1	2	1	7	Penyusunan dan Perencanaan Regulasi TIK	Tersedianya Dokumen Perencanaan TIK	Dokumen		1	200,000,000												Diskominfo		
				1	3			Program Administrasi Perkantoran	Jumlah Perencanaan Pelaporan dan Operasional Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika	Jenis		59	320,650,000													Diskominfo	
				1	3	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benda Pos dan Jasa Transaksi Keuangan	Jenis		2	3,500,000													Diskominfo	
				1	3	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Biaya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik, dan Internet	Jenis		5	263,800,000													Diskominfo	
				1	3	1	3	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Jenis		40	20,000,000													Diskominfo	
				1	3	1	4	Penyediaan barang Cetak dan Pengadaan	Jenis Barang Cetak dan Penjilidan ,Photo Copy	Jenis		4	10,000,000													Diskominfo	
				1	3	1	5	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusun Dokumen Laporan dan Evaluasi	Dokumen		2	3,500,000													Diskominfo	
				1	3	1	6	Penyusunan DPA OPD	Buku Dokumen DPA OPD	Dokumen		1	3,500,000													Diskominfo	
				1	3	1	7	Penyusunan RKA OPD	Buku Dokumen RKA OPD	Dokumen		1	3,500,000													Diskominfo	
				1	3	1	8	Penyusunan Renja OP	Buku / Dokumen Renja OPD	Dokumen		1	3,500,000													Diskominfo	
				1	3	1	9	Penyusunan LAKIPOPDP	Buku /Dokumen LAKIP OPD	Dokumen		1	2,925,000													Diskominfo	
				1	3	1	10	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Buku/ Dokumen Laporan Akhir Tahun	Dokumen		1	3,500,000													Diskominfo	
				1	3	1	11	Penyusunan Pelaporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 bulan Berikutnya	Buku /Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Prognosis	Dokumen		1	2,925,000													Diskominfo	
				1	4			Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Sarana dan Prasarana Layanan Publik Urusan Komunikasi dan Informatika	Jenis		179	1,109,866,000													Diskominfo	
				1	4	1	1	Pembangunan E-Government	FGD Sistem Layanan Darurat 112	Orang		92	331,388,000													Diskominfo	
				1	4	1	2	Desiminasi Informasi melalui Media Cetak, Elektronik, Pertunjukan Rakyat dan wawar Keliling	Media Layanan Informasi Publik	Jenis		2	239,416,000													Diskominfo	

1	4	1	3	Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial	Kegiatan Pendamping LKS, Work Shop, Bintek, Media	Jenis		4	89.794.000												Diskominfo		
1	4	1	4	Pelayanan Informasi Publik	Terbangunya Sistem Pelayanan Informasi Publik	Bulan		12	47.600.000													Diskominfo	
1	4	1	5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	BBM, Pelumas, dan STNK,	Jenis		2	3.818.000													Diskominfo	
1	4	1	6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis		6	50.000.000													Diskominfo	
1	4	1	7	Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	Jumlah Sarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	Bulan		12	78.500.000													Diskominfo	
1	4	1	8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Kebijakan Kantor	Bulan		12	40.000.000													Diskominfo	
1	4	1	9	Penyediaan Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	Jenis		14	10.000.000													Diskominfo	
1	4	1	10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Jenis		3	10.000.000													Diskominfo	
1	4	1	11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surak Kabar, Majalah dan Buksis	Bulan		12	45.000.000														Diskominfo
1	4	1	12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Malcanan dan Minuman Rapat, Tamu, Peserta dan Panitia	Jenis		5	40.000.000													Diskominfo	
1	4	1	13	Pengembangan dan Kemitraan Media	Seminar Jurnalistik, Dialog Interaktif, Workshop,	Jenis Kegiatan		3	124.350.000													Diskominfo	

Majalengka, Agustus 2019
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka



Drs. MAMAN SUTIMAN
Pembina Utama Muda
NIP. 196209231982101001

Tabel T.C. 27
Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif (DISKOMINFO)
Kabupaten Majalengka

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Proram dan kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Jenis Kegiatan		
									Tahun 2019		Tahun-2020		Tahun 2021		Tahun-2022		Tahun-2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			Target	Rp
VISI : mewujudkan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS DAN SEJAHTERA																						
MISI: (3) Membangunan Sinergi dan Hubungan yang Harmonis dengan Seluruh Mitra Kerja dan Pemangku Kebijakan baik dengan Unsur Legislatif,Pemerintah Desa,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta para Pemangku Kepentingan Lain)																						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR																						
(1) URUSAN BIDANG KOMUNIKASI , INFORMATIKA																						
(1.1) PRIORITAS UTAMA																						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika	Kecepatan Akses Jaringan Komunikasi	Tersusunnya Sistem Aplikasi yang mendukung E-Governmet	Aplikasi, Publikasi, Infrastruktur ,Data Statistik Sektoral	1 1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan	1 Jumlah Aplikasi Informasi Publik yang terintegrasi	Buah		500,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	23	4,500,000,000	Diskominfo		
				1 1	1 Intergasi Sistem Elektronik Pemerintah Daerah	SAPK ABSENSI PEGAWAI E-Raharja	Aplikasi	3	500,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	23	4,500,000,000			
(1.2) PENDUKUNG																						
				1 1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Jumlah Layanan Informasi Publik Yang disediakan Pemerintah Daerah	buah	445,630,450	106	783,460,000	151	5,383,000,000	148	4,990,000,000	150	5,094,000,000	151	5,963,800,000	665	21,288,100,000	Diskominfo	
				1 2	1 2 Desiminasi Informasi melalui media cetak elektronik, pertunjukan rakyat dan warling	Tersedianya Media Informasi Publik	Jenis Kegiatan	207,488,000	8	239,416,000	8	648,000,000	8	746,000,000	8	857,000,000	8	986,000,000	32	3,237,000,000	Diskominfo	
					Cetak baligo																	
					Cetak Spanduk																	
					Film dokumenter																	
					iklan Radio Sport																	
					Leafet poster																	
					Buku Kumpulan Bupati																	
					Majalah Gema Sindang kasih																	
				1 2	1 3 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah sarana Informasi publik		31,500,000	5	47,600,000	5	150,000,000	5	173,000,000	5	199,000,000	5	229,000,000	25	751,000,000	Diskominfo	
					Workshop	Kali																
					Bintek SP4 Lapor	Kali																
				1 2	1 4 Peningkatan Kualitas Operasional Pelayanan LPPL Radika	Tersedianya jumlah Perangkat Radio LPPL	Unit				7	150,000,000	7	173,000,000	7	199,000,000	7	229,000,000	28	751,000,000	Diskominfo	

1	2	1	5	Pengembangan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Publikasi Pemerintah Daerah																			
				Saresehan	Kali				4	200,000,000	4	210,500,000	4	221,000,000	4	231,500,000	16	863,000,000	Diskominfo					
				Workshop	Kali				4		4		4		4	16								
				Dialog Interaktif	Kali				2		2		2		2	8								
1	2	1	6	Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial	Jumlah Pemberdayaan LKS melalui Kegiatan																			
				Pameran	Kali				1	106,800,000	1	89,794,000	1	350,000,000	1	367,500,000	1	385,000,000	1	402,500,000	5	1,505,000,000	Diskominfo	
				Workshop	Kali				1		1		1		1		1		1	5				
				Pendapangan	Kali				1		1		1		1		1		1	5				
				Tabloid KIM	Kali				2		2		2		2		2		2	10				
				Film dokumenter	Kali				2		2		2		2		2		2	10				
1	2	1	7	Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Media	Tersedianya media Publikasi																			
				Seminar Jurnalistrik	Kali				2	99,842,450	2	124,350,000	2	250,000,000	2	262,500,000	2	275,000,000	2	287,500,000	8	1,075,000,000	Diskominfo	
				Publik TV	Kali				10		10		10		10		10		10	40				
				Publikasi Media Massa	Kali				12		12		12		12		12		12	48				
1	2	1	8	Pengelolaan Media Promosi City branding	Jenis Media Promosi																			
				Seminar City Branding	Jenis Kegiatan				1		1		1		1		1		1	4				
				Buku City Branding	Jenis Kegiatan				1		1		1		1		1		1	4				
				Papan Reklame	Jenis Kegiatan				1		1		1		1		1		1	4				
				Baligo	Jenis Kegiatan				1		1		1		1		1		1	4				
1	2	1	9	Pengelolaan dan Pengembangan Media Informasi Melalui Diskominfo Chanel	Publikasi Media Informasi																			
				Publikasi Media Online	Jenis				1		1		1		1		1		1	4				
				Perlengkapan dan peralatan studio, video, editing room	Jenis				1		1		1		1		1		1	4				
1	2	2	10	Pengembangan dan Pengelolaan Media Centre	Jumlah pengelolaan Media Centre																			
				Redesign Website	Jenis				1		1		1		1		1		1	4				
				Peralatan dan perlengkapan Kantor, Alat alat Studio	Unit				1		1		1		1		1		1	4				

Pendukung(PD)

				1	2	1	11	Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kominfo	Tersedianya SDM Wasdal, Laporan SKrd, Papan Identitas Menara, Pemeliharaan Drone, Operasional	Jenis Kegiatan		7	244,200,000	5	350,000,000	5	350,000,000	5	350,000,000	5	350,000,000	27	1,644,200,000	Diskominfo	
				1	2	1	19	Pembinaan dan Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika	Terbentuknya SDM Komunikasi TIK	Jumlah		50	38,100,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	250	438,100,000	Diskominfo	
				1	2	2	1	Pengadaan Kendaraan Layanan Informasi	Jumlah Pengadaan Roda 4 dan Perangkat Studio dan Komunikasi	unit				1	750,000,000							1	750,000,000	Diskominfo	
				1	2	2	2	Pengadaan Papan Pengumuman /Billboard	Tersedianya Papan Pengumuman permanen	buah				6	180,000,000	6	207,000,000	6	239,000,000	6	274,000,000	24	900,000,000	Diskominfo	
				1	3	1	2	Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur TIK	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Master Plan	Dokumen				2	250,000,000			2	250,000,000	3	750,000,000	7	1,250,000,000	Diskominfo	
				1	2	2	3	Pengadaan Sarana Layanan Informasi Publik Luar Ruang (Vidiotron)	Jumlah Pengadaan Perangkat Vidiotron	Jumlah				1	800,000,000	1	800,000,000	1	800,000,000	1	800,000,000	4	3,200,000,000	Diskominfo	
				1	2	2	4	Pengadaan Sarana TVC-1 Media untuk Layanan Informasi Publik	Jumlah Perangkat TV C 1	Unit				2	200,000,000	2	210,500,000	2	221,000,000	2	231,500,000	8	863,000,000	Diskominfo	
				1	2	2	5	Pengadaan Kendaraan Operasional Wasdal Kominfo	Jumlah Pengadaan kendaraan operasional roda 2	Unit				3	120,000,000	3	25,000,000	3	25,000,000	3	25,000,000	3	195,000,000	Diskominfo	
				1	2	2	6	Jumpa Pers dan Kemitraan dengan Insan Media	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Pers	Jenis Kegiatan				3	175,000,000	3	185,000,000	3	190,000,000	3	195,000,000	12	745,000,000	Diskominfo	
				1	2	2	7	Majalengka Media AWARDS	Jumlah Kegiatan Pembinaan Media Massa	Jenis Kegiatan				3	160,000,000	3	175,000,000	3	180,000,000	3	185,000,000	12	700,000,000	Diskominfo	
				1	2	2	8	Pengolahan data dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi	Jumlah Data Base Jaringan Informasi	Jenis				1	75,000,000	1	80,000,000	1	85,000,000	1	90,000,000	4	330,000,000	Diskominfo	

				1	3	Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi	1	Jumlah Sarana Infrastruktur Layanan Informasi Publik	Unit		7	707,250,000	70	54,474,212,000	54	53,629,212,000	103	47,339,212,000	54	8,344,212,000	190	164,494,098,000	Diskominfo		
				1	3	1	1	Pembangunan Perangkat Telekomunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Jaringan Telekomunikasi dan Perangkat Menara Receiver Radio	Unit			2	350,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	425,000,000	Diskominfo		
				1	3	1	2	Pembangunan , Pengembangan dan Pengendalian E-Government (Sistem Elektronik Pemerintah)	Perangkat jaringan Informasi Elektronik Pemerintahan	Unit		1	331,338,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	9	2,331,338,000	Diskominfo	
				1	3	1	3	Pembangunan dan pengembangan Data Centre Pemerintah Daerah	Tersedianya, Infrastruktur Command Centre , Media Informasi	unit			2	450,000,000	1	220,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	3	710,000,000	Diskominfo		
				1	3	1	4	Pembangunan Taman Digital Majalengka Raharja	Tersedianya Infrastruktur Jaringan Informasi, Perangkat Media Informasi	Unit			1	1,500,000,000	1	200,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	1,900,000,000	Diskominfo		
				1	3	1	5	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Akses Inforemasi dan Komunikasi menuju Smart City	Jumlah Pengadaan Perangkat Media Informasi dan Komunikasi OPD Desa / Kel	unit			50	50,000,000,000	1	1,000,000,000	50	40,000,000,000	1	1,000,000,000	102	92,000,000,000	Diskominfo		
				1	3	1	6	Pengembangan Server Pusat Informasi	Jumlah Peningkatan Server OPD	Perangkat		1	124,212,000	3	124,212,000	3	124,212,000	3	124,212,000	3	124,212,000	3	621,060,000	Diskominfo	
				1	3	1	7	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Akses Informasi dan Komunikasi	Tersedianya sarana Infrastruktur informasi publik																
								Jaringan Interkoneksi OPD	Unit	416,610,000	1	251,700,000	1	450,000,000	1	450,000,000	1	450,000,000	1	450,000,000	4	2,051,700,000	Diskominfo		
								Jaringan Video Conference	Unit		1		1		1		1		1		4				
								Infrastruktur Menara three angle	Unit		1		1		1		1		1		4				
								Jaringan VCIP	Unit		1		1		1		1		1		4				
								Jaringan Voip OPD	Unit		1		1		1		1		1						
				1	3	1	8	Pembangunan Interkoneksi Pita Lebar (FO) Antar OPD	Jumlah Perangkat Akses Jaringan interkoneksi OPD	Unit					35	50,000,000,000	35	5,000,000,000	35	5,000,000,000	35	60,000,000,000	Diskominfo		

				1	1	1	2	Pembangunan Meta Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Meta Data Statistik Sektoral	Dokumen				2	200,000,000	2	210,000,000	2	220,000,000	2	230,000,000	8	860,000,000	Diskominfo		
				1	1	1	3	Pengolahan Dan Analisis Data Asepasial	Jumlah hasil Pengumpulan Data Dasar 3 Indikator, Kesehatan, pendidikan dan Daya beli	Dokumen				1	850,000,000	1		1		1	1,000,000,000	4	1,850,000,000	Diskominfo		
				1	1				Jumlah Dokumen dan Informasi Statistik Sektoral Daerah	Dokumen			4	150,000,000	21	1,525,000,000	21	1,180,000,000	21	1,245,000,000	21	1,365,000,000	60	5,515,000,000	Diskominfo	
				1	1	2	1	Kajian Data Statistik Sektoral	Tersedianya Dokumen	Dokumen																
								Buku Profil Sosial dan Ekonomi	1			1		1		1		1		1		1		4		
								Buku Analisis Pemerataan Pembangunan	1			1		1		1		1		1		1		4		
								Buku Indikator Pembangunan (Gini Rasio)	1			1		1		1		1		1		1		4		
								Buku Statistik Regional	1			1		1		1		1		1		1		4		
				1	1	2	2	Peningkatan Kapasitas SDM Statistik	Jumlah Pelaksanaan Workshop, BinteK , Pengolahan Data Base, Forecasting	Jenis Kegiatan				5	150,000,000	5	157,500,000	5	165,000,000	5	240,000,000	5	712,500,000	Diskominfo		
				1	1	2	3	Desiminasi Statistik Sektoral melalui Multimedia	Jumlah Pelaksanaan Desiminasi Statistik Sektoral	Jenis Kegiatan				3	125,000,000	3	130,000,000	3	145,000,000	3	147,500,000	3	547,500,000	Diskominfo		
				1	1	2	4	Pembangunan Infrastruktur Sektoral	Jumlah Pengadaan Infrastruktur Open Data	Unit				1	200,000,000	1	210,000,000	1	220,000,000	1	230,000,000	4	860,000,000	Diskominfo		
				1	1	2	5	ADM (Anjungan Data Mandiri	Jumlah Anjungan Data Mandiri	Unit				4	500,000,000	4	210,000,000	4	220,000,000	4	230,000,000	16	1,160,000,000	Diskominfo		
				1	1	2	6	Optimalisasi Pelayanan Informasi Bina Santel	Jumlah Anjungan Data Mandiri	Unit				4	500,000,000	4	210,000,000	4	220,000,000	4	230,000,000	16	1,160,000,000	Diskominfo		

(3) URUSAN DASAR																									
Meningkatkan Kapasitas Kinerja Perangkat Daerah	Katagori Nilai SAKIP OPD	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kinerja Perangkat Daerah	Tindak Lanjut Temuan Inspektorat / BPK	1	1		Program Pendukung Administrasi Urusan Komunikasi dan Informatika	1 Presentase Pegawai Yang terpenuhi Kebutuhan Kesejahteraan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	169,500,000	100	118,500,000	100	300,000,000	100	315,000,000	100	320,000,000	100	320,000,000	100	1,373,500,000	Diskominfo		
				1	1	1	1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Dinas, Batik dan Olah Raga	Stel			50	75,000,000	50	75,000,000	50	75,000,000	50	75,000,000	50	300,000,000	Diskominfo		
				1	1	1	2	Penyediaan jasa penunjang kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Sarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	Jenis	87,000,000	2	78,500,000	2	150,000,000	2	155,000,000	2	155,000,000	2	155,000,000	2	693,500,000	Diskominfo	
				1	1	1	3	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Pemerintah Daerah	Bulan	82,500,000	12	40,000,000	12	150,000,000	12	160,000,000	12	165,000,000	12	165,000,000	12	680,000,000	Diskominfo	
									2 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	625,085,050	100	485,000,000	100	945,000,000	100	985,000,000	100	1,095,500,000	100	1,107,500,000	100	4,268,000,000	Diskominfo	
				1	2	3	1	penyediaan jasa komunikasi. Sumber daya air dan listrik	Jumlah Biaya jasa Komunikasi Suberdaya Air dan Listrik	Jenis	294,950,000	5	350,000,000	5	375,000,000	5	385,000,000	5	385,000,000	5	385,000,000	5	1,530,000,000	Diskominfo	
				1	2	3	2	Penyediaan alat tulis kantor dan Benda Pos	Jumlah ATK dan Benda Pos	Jenis	38,625,000	40	20,000,000	40	80,000,000	40	85,000,000	40	90,500,000	40	92,500,000	40	368,000,000	Diskominfo	
				1	2	3	3	Penyediaan cetakan dan penggandaan	Jumlah Photo Copy , Cetakan dan Penjilidan	Jenis	22,616,850	2	10,000,000	3	60,000,000	3	70,000,000	3	75,000,000	3	85,000,000	3	300,000,000	Diskominfo	
				1	2	3	4	Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung	Jenis	20,000,000	20	10,000,000	30	40,000,000	30	40,000,000	30	40,000,000	30	40,000,000	30	170,000,000	Diskominfo	
				1	2	3	5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jenis	20,000,000	20	10,000,000	20	45,000,000	20	45,000,000	20	45,000,000	20	45,000,000	20	190,000,000	Diskominfo	
				1	2	3	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar dan Belanja Jasa Publikasi Media Cetak	Bulan	78,125,000	12	45,000,000	12	95,000,000	12	110,000,000	12	110,000,000	12	110,000,000	12	470,000,000	Diskominfo	

1	1	3	7	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman Rapat, Tamu, Peserta dan Panitia Kegiatan	Jenis	150,768,200	4	40,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	4	350,000,000	4	350,000,000	4	1,240,000,000	Diskominfo	
1	2			Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	897,427,500	100	50,000,000	100	800,000,000	100	830,000,000	100	850,000,000	100	940,000,000	100	3,470,000,000	Diskominfo	
1	2	1	1	Pembangunan Gedung Kantor	Bangunan gedung Kantor yang representatif	Lokasi	148,948,000			2	350,000,000	2	365,000,000	2	375,000,000	2	395,000,000	2	1,485,000,000	Diskominfo	
1	2	1	2	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Lokasi				2	350,000,000	2	365,000,000	2	375,000,000	2	395,000,000	8	1,485,000,000	Diskominfo	
1	2	1	3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	748,479,500	5	50,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	150,000,000	10	500,000,000	Diskominfo	
1	2	2			2 Prosentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen		100	47,500,000	100	115,000,000	100	120,000,000	100	130,000,000	100	130,000,000	100	542,500,000	Diskominfo	
1	2	2	1	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharaan Gedung Kantor	Unit		1	42,500,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	90,000,000	2	90,000,000	2	382,500,000	Diskominfo	
1	1	2	2	Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Terpeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit		1	5,000,000	2	35,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	160,000,000	Diskominfo	
1	3			Program Penyusunan Rencana , Pengendalian dan Evaluasi serta Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	7,275,000	100	6,425,000	100	15,000,000	100	16,000,000	100	16,400,000	100	17,750,000	100	68,650,000	Diskominfo	
1	3	1	1	Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Lakip	Dokumen	4,350,000	1	2,925,000	1	7,500,000	1	7,500,000	1	7,650,000	1	8,750,000	4	31,400,000	Diskominfo	
1	3	1	2	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah Laporan Kinerja PD	Dokumen	2,925,000	1	3,500,000	1	7,500,000	1	8,500,000	1	8,750,000	1	9,000,000	4	37,250,000	Diskominfo	
1	3				2 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika	Persen	9,168,750	100	10,500,000	100	28,000,000	100	28,000,000	100	28,000,000	100	54,000,000	100	138,000,000	Diskominfo	
1	3	2	1	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	Dokumen	3,037,500	1	3,500,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	4	60,000,000	Diskominfo	
1	3	2	2	Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA PD	Dokumen										1	25,000,000	1	25,000,000	Diskominfo	
1	3	2	3	Penyusunan DPA dan DPAP	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD	Dokumen	2,268,750	2	3,500,000	2	6,500,000	2	6,500,000	2	6,500,000	2	7,500,000	8	27,000,000	Diskominfo	

					1	3	2	4	Penyusunan RKA dan RKAP	Jumlah Perencanaan Anggaran PD	Dokumen	3,862,500	2	3,500,000	2	6,500,000	2	6,500,000	2	6,500,000	2	6,500,000	8	26,000,000	Diskominfo		
										3	Tingkat Kesiadaan data dan Informasi Pembangunan Pada Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika	Persen	0	100	6,500,000	100	6,500,000	100	7,500,000	100	7,650,000	100	8,750,000	100	36,900,000		
					1	3	1	1	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil PD	Dokumen		1	6,500,000	1	6,500,000	1	7,500,000	1	7,650,000	1	8,750,000	4	36,900,000	Diskominfo		

Majalengka, September 2019
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Majalengka

Drs. MAMAN SUTIMAN
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196209231982101001